



Perubahan Kedua RENCANA STRATEGIS

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
Tahun 2016-2021



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Semarang 2018



PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Semarang

Tahun 2016 - 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Semarang

2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2016-2021 dapat tersusun.

Perubahan Kedua Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunannya juga berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Perubahan Kedua Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Perubahan Kedua Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang.

Kami menyadari bahwa Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Plt. KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG

GUNAWAN SAPTOGIRI, SH. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 LANDASAN HUKUM	I-2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG.....	II-1
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA SEMARANG ..	II-1
2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA KOTA SEMARANG	II-6
2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG	II-12
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG	II-26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA SEMARANG	III-1
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG	III-1
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	III-3
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI	III-7
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	III-10
3.5 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS	III-13
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

LAMPIRAN 1 INDIKATOR KINERJA ESELON III DAN ESELON IV BAPPEDA KOTA SEMARANG

LAMPIRAN 2 CASCADING BAPPEDA KOTA SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-6
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 Berdasarkan Golongan / Ruang	II-7
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum	II-8
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan.....	II-9
Tabel 2.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kota Semarang Tahun 2017	II-10
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Semarang Tahun 2011-2015	II-13
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelaksanaan Urusan Bappeda Kota Semarang Tahun 2011-2015	II-16
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Semarang Tahun 2016	II-18
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Semarang Tahun 2017	II-19
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2017	II-20
Tabel 2.11	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Semarang Tahun 2011 - 2017	II-21
Tabel 2.12	Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Tahun 2011 - 2017	II-22
Tabel 2.13	Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2014 - 2018	II-23
Tabel 2.14	Jumlah Penelitian yang Dilaksanakan Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Semarang Tahun 2011 - 2017	II-24
Tabel 2.15	Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2011 - 2017	II-25
Tabel 4.1	Matriks Tujuan, Sasaran, Beserta Indikator dan Target Kinerja Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021	IV-4

Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 - 2021	V-3
Tabel 6.1	Penataan Program dan Kegiatan pada Perubahan Renstra dan Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021	VI-2
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021	VI-6
Tabel 7.1	Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021	VII-1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Bappeda Kota Semarang yang Mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2016 - 2021	VII-2
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 dalam Fungsi Koordinasi Bappeda Kota Semarang	VII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Organisasi Bappeda Kota Semarang	II-5
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-7
Gambar 2.3	Komposisi Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 Berdasarkan Golongan / Ruang	II-8
Gambar 2.4	Komposisi Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum	II-9
Gambar 2.5	Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD Kota Semarang Tahun 2011 - 2017	II-22
Gambar 2.6	Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2014 - 2018	II-23
Gambar 3.1	Misi Walikota dan Wakil Walikota Sermarang tahun 2016-2021	III-4
Gambar 3.2	Kontribusi Bappeda dalam Mendukung Pencapaian Visi - Misi Walikota Semarang Tahun 2016 - 2021	III-6
Gambar 6.1	Kerangka Alur Pikir Penentuan Indikator Outcome Program Utama pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021	VI-4

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkan Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal (2) yaitu “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Sehubungan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Semarang. Dan sesuai ketentuan tersebut, penyusunan Renstra dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang.

Pada tahun 2016 Kota Semarang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk Bappeda Kota Semarang. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2016-2021, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama terkait dengan perubahan Perangkat Daerah dan penyesuaian permasalahan / isu strategis pembangunan Kota Semarang, maka kemudian ditetapkan Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, sebagaimana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Bappeda ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya terkait perubahan susunan Perangkat Daerah dan Perubahan RPJMD Kota Semarang, serta penyesuaian permasalahan / isu strategis pembangunan Kota Semarang.

Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan permasalahan / isu strategis pembangunan serta perubahan kebijakan terkait program kegiatan di Kota Semarang, perlu dilakukan perbaikan terhadap substansi Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua terhadap Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Bappeda dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 adalah :

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Kota Semarang dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 sesuai tugas dan fungsi Bappeda;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Semarang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Secara lebih khusus, maksud dari penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 adalah untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, penyesuaian perkembangan permasalahan / isu strategis pembangunan, serta perubahan kebijakan terkait program kegiatan di Kota Semarang. Adapun tujuannya yaitu untuk melakukan perbaikan substansi Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tahunan Bappeda, dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Kedua Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Bab II berisi gambaran pelayanan Bappeda Kota Semarang yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kota Semarang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA SEMARANG

Bab III berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kota Semarang; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Semarang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Kota Semarang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator kinerjanya disertai pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII berisi indikator kinerja Bappeda Kota Semarang yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab VIII berisi penutup dari Perubahan Kedua Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 - 2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA SEMARANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah. Mendasarkan pada peraturan ini, Bappeda melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, yaitu Urusan Wajib Penataan Ruang, Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, serta Urusan Wajib Statistik.

Pada tahun 2016 ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, dimana disebutkan bahwa Bappeda merupakan Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, terjadi perubahan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, dimana Bappeda tidak lagi melaksanakan Urusan Wajib Penataan Ruang dan Urusan Wajib Statistik, serta Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan beralih menjadi Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; dimana disebutkan bahwa Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bappeda menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- d. Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Bappeda;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain perubahan pada tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, juga terjadi perubahan susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Sub Bidang Perencanaan Pemerintah, Sub Bidang Perencanaan Sosial, dan Sub Bidang Perencanaan Budaya.

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
- 2) Sub Bidang Perencanaan Sosial;
- 3) Sub Bidang Perencanaan Budaya.

d. Bidang Perencanaan Perekonomian

Bidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Sub Bidang Perencanaan Dunia Usaha, Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi dan Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Makro.

Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Perencanaan Dunia Usaha;
- 2) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi;
- 3) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Makro.

e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air dan Sub Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Pemukiman.

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- 2) Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air;
- 3) Sub Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman.

f. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Sub Bidang Penyusun Rencana Pembangunan Daerah, Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah, dan Sub Bidang Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Penyusun Rencana Pembangunan Daerah;
- 2) Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah;
- 3) Sub Bidang Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintah, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, dan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

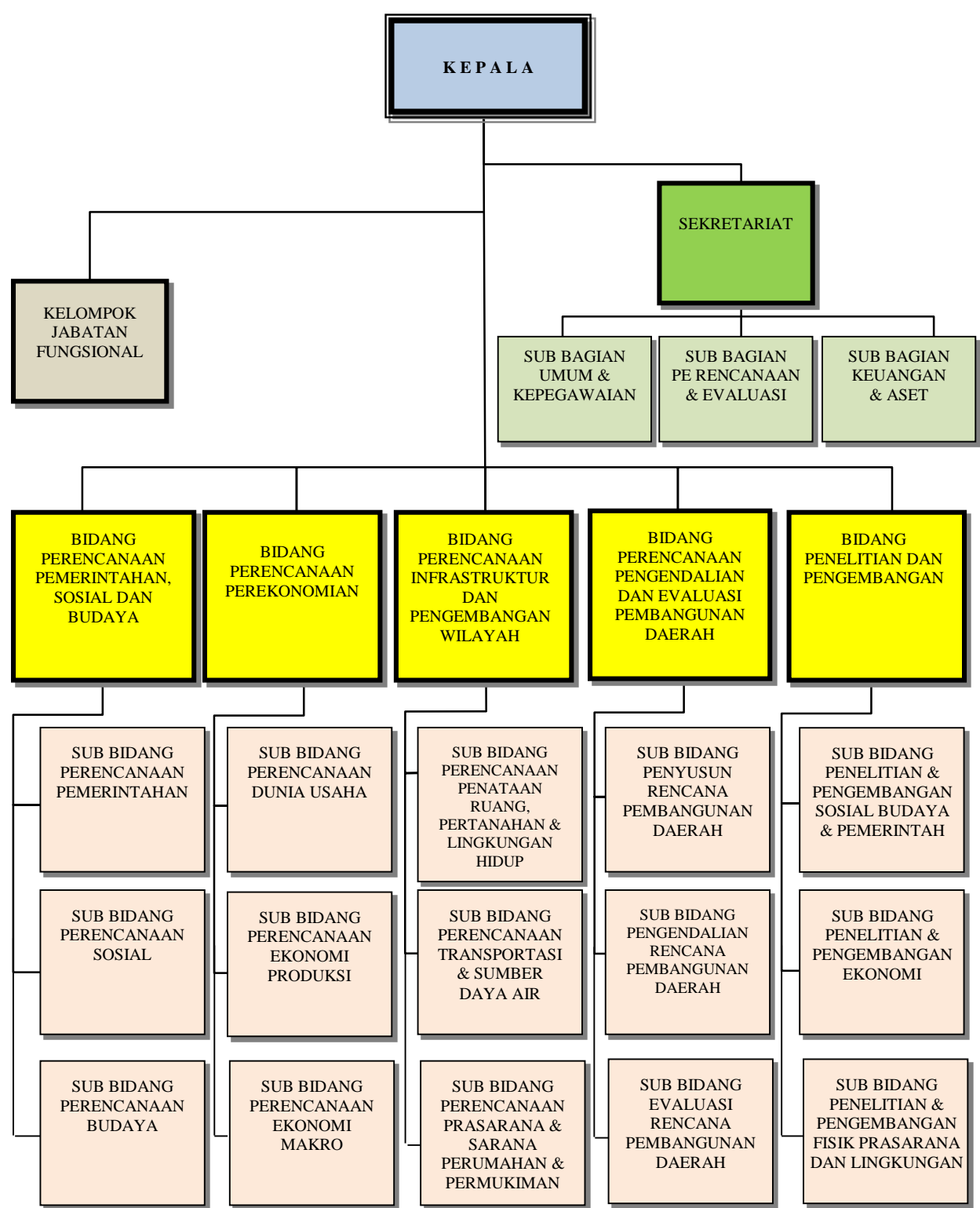
- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintah;
- 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi;
- 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Kepala Bappeda Kota Semarang.

Perubahan susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi tersebut selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penentuan strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana nantinya diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang.

Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Bappeda Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

BAGAN ORGANISASI BAPPEDA KOTA SEMARANG



Gambar 2.1
Bagan Organisasi Bappeda Kota Semarang

2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA KOTA SEMARANG

a. Sumber Daya Aparatur Bappeda Kota Semarang

Berdasarkan data kepegawaian Bappeda Kota Semarang pada Desember 2017, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 71 pegawai, yang terdiri dari 35 pegawai laki-laki (49,30 %) dan 36 pegawai perempuan (50,70 %). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 4 pegawai, yang terdiri dari 1 pegawai Non ASN laki-laki (25,00 %) dan 3 pegawai Non ASN perempuan (75,00 %). Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bappeda Kota Semarang adalah sebanyak 75 pegawai.

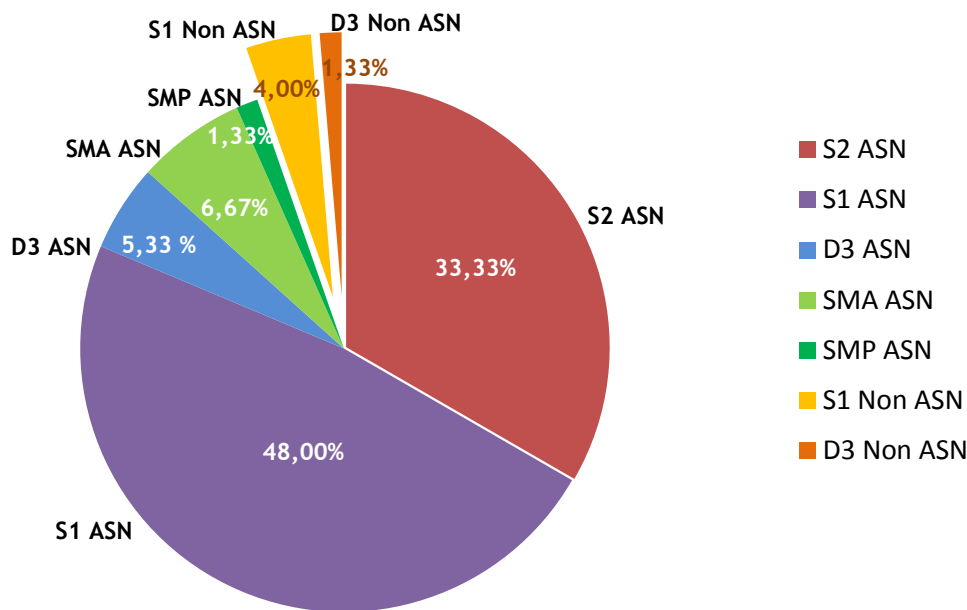
Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Bappeda didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 65 orang (91,55 %). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 6 orang (8,45 %). Sedangkan untuk pegawai Non ASN, hanya 1 orang (25,00 %) yang merupakan lulusan D3, sisanya (75,00 %) merupakan lulusan S1.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi	65	91,55	86,67	4	100,00	5,33
1.	S2	25	35,21	33,33	0	0,00	0,00
2.	S1	36	50,70	48,00	3	75,00	4,00
3.	D3	4	5,64	5,33	1	25,00	1,33
	Bukan Perguruan Tinggi	6	8,45	8,00	0	0,00	0,00
4.	SMA	5	7,04	6,67	0	0,00	0,00
5.	SMP	1	1,41	1,33	0	0,00	0,00
Jumlah		71	100,00	94,67	4	100,00	5,33
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		75 pegawai					

Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017



Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017

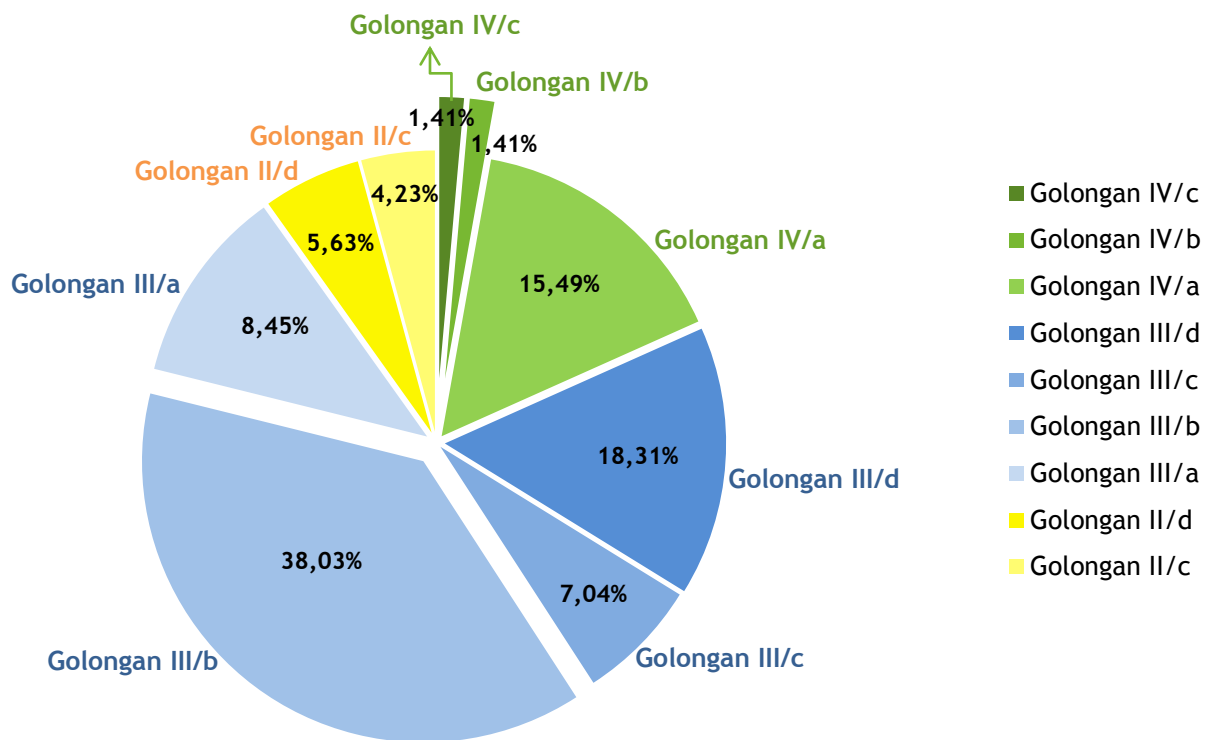
Gambar 2.2
Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 71 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 13 pegawai (18,31 %), golongan III sebanyak 51 pegawai (71,83 %), dan golongan II sebanyak 7 pegawai (9,86 %), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017
Berdasarkan Golongan / Ruang

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	13	18,31
	IV/c	1	1,41
	IV/b	1	1,41
	IV/a	11	15,49
2.	Golongan III	51	71,83
	III/d	13	18,31
	III/c	5	7,04
	III/b	27	38,03
	III/a	6	8,45
3.	Golongan II	7	9,86
	II/d	4	5,63
	II/c	3	4,23
JUMLAH		71	100,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017



Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017

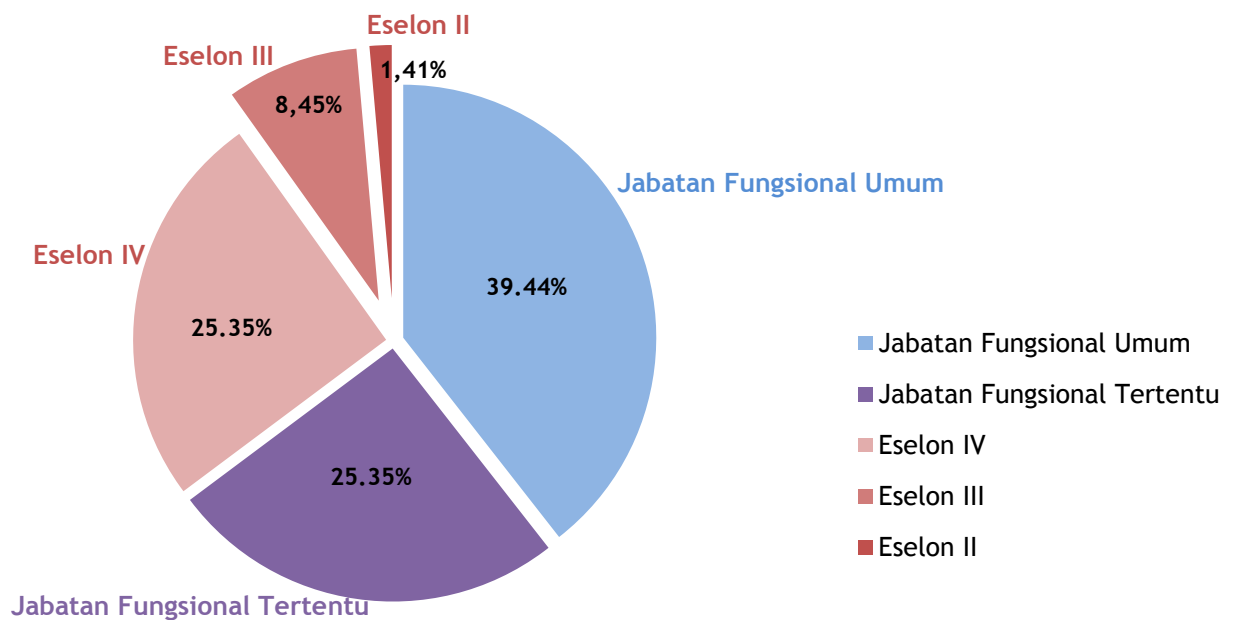
Gambar 2.3
Komposisi Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017
Berdasarkan Golongan / Ruang

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 71 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (1,41 %) yang menduduki eselon II, 6 pegawai (8,45 %) yang menduduki eselon III, 18 pegawai (25,35%) yang menduduki eselon IV, 18 pegawai (25,35 %) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 28 pegawai (39,44 %) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017 yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Eselon II	1	1,41
2.	Eselon III	6	8,45
3.	Eselon IV	18	25,35
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	18	25,35
5.	Jabatan Fungsional Umum	28	39,44
JUMLAH		71	100,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017



Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017

Gambar 2.4
Komposisi Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017
yang Menduduki Eselon, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum

Dari 18 pegawai yang termasuk dalam kelompok Jabatan Fungsional Tertentu tersebut di atas, 14 orang (77,78 %) memiliki Jabatan Fungsional Perencana, 1 orang (5,56 %) memiliki Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, 1 orang (5,56 %) memiliki Jabatan Fungsional Arsiparis, serta 2 orang (11,11 %) memiliki Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Adapun dari sisi keikutsertaan dalam Diklat Kepemimpinan, dari 71 pegawai ASN sebanyak 18 pegawai (25,35 %) telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai ASN Bappeda Kota Semarang Tahun 2017
Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	ADUM / Diklat Pim IV	12	16,90
2.	SPAMA / Diklat Pim III	5	7,04
3.	SPAMEN / Diklat Pim II	1	1,41
JUMLAH		18	25,35

Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017

b. Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kota Semarang

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas pada Bappeda Kota Semarang. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Bappeda Kota Semarang berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja.

Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur
Bappeda Kota Semarang Tahun 2017

No	Jenis Barang	Jumlah
Sarana Transportasi		
1	Roda 4	11
2	Roda 2	21
Sarana Telekomunikasi		
1	Telepon Lokal	10
2	Telepon Langsung	5
3	Faximile	4
Peralatan dan Perlengkapan Kerja		
1	Komputer	53
2	OHP	1
3	Laptop	60
4	Monitor	10
5	UPS	7
6	Printer	51
7	LCD Proyektor	11
8	Meja ½ Biro	17
9	Mesin Ketik	16
10	Filling Cabinet Kayu	8
11	Plotter	1
12	White Board	3
13	Meja Rapat Kaca	3
14	Meja Rapat	19
15	Meja Ketik	5
16	Meja Resepsionis	2
17	Meja Samping	20
18	Meja Kursi Tamu	3
19	Meja Komputer	21
20	Meja Pimpinan	1
21	Meja Biro	20
22	Meja Staf	87
23	Kursi Putar Atlanta	12

No	Jenis Barang	Jumlah
24	Kursi Putar Isabela	8
25	Kursi Staf	73
26	Kursi Putar Pimpinan	11
27	Kursi Putar Eselon IV	11
28	Kursi Rapat Ka	8
29	Kursi Hadap	9
30	Almari Buffet	1
31	Almari buffet Kaca	1
32	Almari Arsip Besar	2
33	Almari Besar Dinding	3
34	Filling Kabinet Besi	12
35	Almari Besi	31
36	Wireless TOA	2
37	Almari Gambar	2
38	Kabel Audio	160 mt
39	Kipas Angin Berdiri	5
40	Televisi	8
41	Cassette Recorder	1
42	Panaboard	2
43	Kursi Lipat	66
44	AC Unit	9
45	HandyCam	1
46	Kamera Digital	12
47	Tangga (B1)	1
48	Dispenser	7
49	N komputing	3
50	Almari besi Mobile	2
51	Screen Motorized	2
52	Buku	129
53	Filing cabinet Besi (data file)	1
54	Meja Conter	1
55	Meja Eselon IV	1
56	Werless presenter (Logitec)	5
57	Kursi Rapat	86
58	Layar Proyektor	9
59	Net Computing L230	2
60	Kursi Kerja Pimpinan	3
61	Troli	2
62	Rak TV	1
63	Kulkas/ Lemari Es	2
64	TV Plasma 43 Inch	1
65	Dri Cabinet	1

No	Jenis Barang	Jumlah
66	Cas Box	2
67	Penghancur Kertas	3
68	Brankas	2
69	Jaringan Server	1
70	Jaringan internet	2
71	Maket	19
72	Almari Pendek Ruang Rapat	2
73	Backdrop Layar	3
74	Ornamen Ruang Rapat	1
75	Ampli Mixer	2
76	Pintu Sekat Rapat	1
77	Mix Meja Sound	4
78	Mix Shure	2
79	Spiker Audio	2
80	Briker Spiker	2
81	Perekam	10
82	Wirelesportable	2
83	Smart TV	2

Sumber : Bappeda Kota Semarang, per Desember 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Bappeda Kota Semarang merupakan Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, Bappeda Kota Semarang memiliki kewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Bappeda Kota Semarang.

Pada dokumen Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2010-2015 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Bappeda di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Semarang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Sasaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai bahan acuan bagi stakeholder pembangunan Pemerintah Kota Semarang;																		
	Tersusunnya RPJPD				100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Tersusunnya RPJMD				100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Tersusunnya RKPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Sasaran : Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan																		
	Terciptanya Sarana Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Kota				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
3	Sasaran : Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan & aturan yang berlaku																		
	Kajian tentang tata ruang wilayah				1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
4	Sasaran : Terciptanya arah pengembangan kota menuju percepatan pembangunan Kota Semarang																		
	Kajian tentang permasalahan kota besar				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Sasaran : Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kota Semarang																		
	Kajian Bidang Infrastruktur dan Lingk Hidup				3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang;																		
	Kajian bidang Ekonomi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kajian bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kualitas kebijakan perencanaan berbasis litbang yg semakin meningkat																		
	Peningkatan kualitas litbang				10 kajian	10 kajian	10 kajian	10 kajian	10 kajian	9 kajian	5 kajian	4 kajian	5 kajian	4 kajian	90%	50%	40%	50%	40%
8	Semakin berkembangnya jejaring / network mengenai penelitian & pengembangan																		
	Pengembangan Program Litbang dengan lembaga Penelitian				1 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
9	Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;																		
	Peningkatan kualitas informasi data				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan secara periodik;																		
	Ketersediaan fasilitas informasi untuk perencanaan pembangunan				100%	100%	100%	100%	100%	80%	82,50%	82,50%	90%	95%	80%	82,50%	82,50%	90%	95%
11	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;																		
	Tersedianya sarana adm & sarana prasarana perkantoran sbg penunjang kinerja				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional;																		
	Peningkatan kualitas aparatur perencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda																		
	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban yang berkaitan dg keuangan secara efisien dan efektif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Adapun untuk realisasi kinerja keuangan, pada tahun 2011-2015 Bappeda Kota Semarang menerima total alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 23.229.673.591,- dengan realisasi sebesar Rp 22.271.385.199,- (95,87 %). Sementara untuk Belanja Langsung, total alokasi anggaran yang diterima adalah sebesar Rp 68.331.827.000,- dengan realisasi sebesar Rp 57.770.220.317,- (84,54 %). Anggaran Belanja Langsung tersebut digunakan untuk melaksanakan program / kegiatan pada 3 urusan wajib, yaitu Urusan Wajib Penataan Ruang, Urusan Wajib Perencanaan, serta Urusan Wajib Statistik. Secara rinci anggaran beserta realisasi pendanaan pelayanan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2011-2015 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelaksanaan Urusan
Bappeda Kota Semarang Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	JUMLAH BELANJA	16.898.525.000	16.874.774.000	19.831.778.000	17.105.909.000	20.850.514.591	15.384.068.663	14.714.111.458	16.723.962.935	15.143.949.003	18.075.513.457	91,04	87,20	84,33	88,53	86,69	6,38	4,80
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.119.441.000	4.308.194.000	4.615.611.000	4.586.869.000	5.599.558.591	4.002.649.307	4.240.275.952	4.337.430.897	4.399.206.526	5.291.822.517	97,16	98,42	93,97	95,91	94,50	8,29	7,49
	BELANJA LANGSUNG	12.779.084.000	12.566.580.000	15.216.167.000	12.519.040.000	15.250.956.000	11.381.419.356	10.473.835.506	12.386.532.038	10.744.742.477	12.783.690.940	89,06	83,35	81,40	85,83	83,82	5,88	4,00
	URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG	2.650.000.000	838.500.000	1.147.625.000	445.235.000	1.300.000.000	2.127.682.695	745.643.650	916.988.750	334.807.700	966.236.800	80,29	88,93	79,90	75,20	74,33	24,82	20,78
1.05.15	Program Perencanaan Tata Ruang	950.000.000	750.000.000	1.147.625.000	445.235.000	1.300.000.000	881.993.195	659.370.200	916.988.750	334.807.700	966.236.800	92,84	87,92	79,90	75,20	74,33	40,69	34,73
1.05.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.700.000.000	88.500.000	0	0	0	1.245.689.500	86.273.450	0	0	0	73,28	97,48	0	0	0	-48,70	-48,27
	URUSAN WAJIB PERENCANAAN	9.679.084.000	11.268.080.000	13.430.042.000	11.449.805.000	13.350.956.000	8.813.038.071	9.278.149.796	10.886.558.258	9.814.314.457	11.238.278.590	91,05	82,34	81,06	85,72	84,18	9,37	6,82
1.06.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.275.900.000	776.853.000	1.246.650.000	878.069.600	880.782.000	1.207.702.835	585.511.458	679.419.608	629.511.190	411.714.082	94,65	75,37	54,50	71,69	46,74	-1,97	-19,36
1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	277.100.000	365.544.000	1.081.144.000	927.243.000	1.758.371.000	249.704.774	294.391.356	852.330.466	823.418.656	1.402.402.086	90,11	80,54	78,84	88,80	79,76	75,77	68,59
1.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya	40.000.000	40.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	3.000.000	11.250.000	3.950.000	0	0	7,50	28,13	26,33	0	0	-23,96	27,53

No	Uraian	Anggaran (Rp)					Realisasi Anggaran (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	152.000.000	276.150.000	268.800.000	270.472.400	297.099.000	135.911.115	158.148.100	169.463.500	254.942.650	249.275.350	89,42	57,27	63,04	94,26	83,9	22,37	17,93
1.06.01.15	Program pengembangan data dan informasi	600.000.000	575.000.000	528.875.800	1.018.500.000	1.186.200.000	551.213.697	538.502.323	490.456.238	939.658.543	1.097.943.600	91,87	93,65	92,74	92,26	92,56	24,21	24,30
1.06.01.16	Program kerjasama pembangunan	500.000.000	300.000.000	672.800.000	704.235.000	750.000.000	499.855.045	296.413.300	591.705.451	617.364.790	672.912.000	99,97	98,80	87,95	87,66	89,72	23,86	18,06
1.06.01.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	1.787.650.000	1.460.000.000	2.300.529.000	1.550.000.000	1.385.000.000	1.569.382.995	1.346.584.200	1.916.671.170	1.456.214.750	1.208.770.380	87,79	92,23	83,31	93,95	87,28	-1,01	-3,22
1.06.01.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan	257.025.000	405.000.000	350.000.000	200.000.000	554.000.000	194.975.850	328.822.250	254.419.050	181.219.600	278.421.600	75,86	81,19	72,69	90,61	50,26	44,53	17,72
1.06.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.800.000.000	2.596.253.000	2.429.631.000	2.132.200.000	3.143.639.000	1.686.861.300	2.281.991.650	2.065.664.475	1.848.689.380	2.755.084.322	93,71	87,90	85,02	86,70	87,64	18,25	16,08
1.06.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	700.000.000	1.358.280.000	1.062.480.000	1.147.200.000	1.247.820.000	641.935.650	1.115.962.359	945.519.700	1.014.614.298	1.189.209.950	91,71	82,16	88,99	88,44	95,3	22,25	20,77
1.06.01.23	Program perencanaan sosial dan budaya	1.939.409.000	3.115.000.000	3.474.132.200	2.606.885.000	2.138.045.000	1.760.938.305	2.320.572.800	2.916.958.600	2.048.680.600	1.972.545.220	90,80	74,50	83,96	78,59	92,26	7,30	6,00
1.06.01.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	350.000.000	0	0	0	0	311.556.505	0	0	0	0	89,02	0	0	0	0	-25,00	-25,00
	URUSANWAJIB STATISTIK	450.000.000	460.000.000	638.500.000	624.000.000	600.000.000	440.698.590	450.042.060	582.985.030	595.620.320	579.175.550	97,93	97,84	91,31	95,45	96,53	8,73	7,77
1.23.01.15	Program pengembangan	450.000.000	460.000.000	638.500.000	624.000.000	600.000.000	440.698.590	450.042.060	582.985.030	595.620.320	579.175.550	97,93	97,84	91,31	95,45	96,53	8,73	7,77

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Selanjutnya pada dokumen Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebelum perubahan telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Bappeda beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2016 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Semarang Tahun 2016

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUNAN						TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI 2016
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Kesesuaian antar dokumen perencanaan	1. Kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD tahunan	%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,63
		2. Kesesuaian program di RKPD tahunan dengan program di APBD tahunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3. Kesesuaian kegiatan di RKPD tahunan dengan kegiatan di APBD tahunan	%	99,12	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60	99,60	99,87
		4. Ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,67
		5. Ketepatan pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur perencana	Fasilitasi peningkatan capacity building sumber daya aparatur perencana	%	40,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00	40,00
3	Tertib pengelolaan penyelenggaraan administrasi dan perkantoran	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah	%	80,00	83,00	86,00	89,00	92,00	95,00	95,00	80,00
		2. Tersedianya integrasi sistem penunjang perencanaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	%	75,00	79,00	83,00	87,00	91,00	95,00	95,00	75,00

Sumber : LKJIP Bappeda Kota Semarang Tahun 2016

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa untuk realisasi dari indikator-indikator pada sasaran “Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan” meskipun sudah cukup baik, namun masih belum optimal. Begitu pula dengan realisasi dari indikator-indikator pada sasaran “Kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur Perencana” serta “Tertib Pengelolaan Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran”, meskipun telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun menunjukkan kondisi yang belum ideal dan perlu terus ditingkatkan dalam rangka menunjang kinerja perencanaan.

Kemudian pada dokumen Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 juga telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Bappeda beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2017 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Semarang Tahun 2017

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALI SASI	TARGET CAPAIAN TAHUNAN					TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALI SASI 2017
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang	Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	96,99	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,00	100,39
Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	1. Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	89,90	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,00	106,44
	2. Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	%	99,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3. Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	76,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	87,00

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa target dari indikator sasaran “Persentase Kesesuaian Muatan antar Dokumen Perencanaan dan dengan Dokumen Pelaksanaan Antar Waktu” telah tercapai. Bahkan untuk indikator tujuan “Persentase Capaian Indikator Tujuan Pembangunan pada RPJMD Kota Semarang” serta indikator sasaran “Persentase Capaian Indikator Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kota Semarang” dan “Persentase Hasil Kajian Penelitian yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” targetnya telah terlampaui. Meskipun demikian capaian indikator-indikator ini harus senantiasa dikoordinasikan untuk mempertahankan capaian optimal sebagai perwujudan dari perencanaan yang ideal.

Terkait pendanaan untuk pelayanan, Bappeda Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2016 menerima total anggaran sebesar Rp 25.095.877.792,- dengan realisasi sebesar Rp 22.502.756.206,- (89,67 %). Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.899.745.792,- dengan realisasi sebesar Rp 6.752.355.067,- (97,86 %), dan Belanja Langsung sebesar Rp 18.196.132.000,- dengan realisasi sebesar Rp 15.750.401.139,- (86,56 %).

Adapun untuk Tahun 2017, Bappeda Kota Semarang menerima total anggaran sebesar Rp 22.438.838.000,- dengan realisasi sebesar Rp 20.417.192.587,- (90,99 %). Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 9.449.072.000,- , dengan realisasi sebesar Rp 8.841.725.509,- (93,57 %), dan Belanja Langsung sebesar Rp 12.989.766.000,- , dengan realisasi sebesar Rp 11.575.467.078,- (89,11 %).

Adapun anggaran beserta realisasi pendanaan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 dan 2017

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)		Rasio antara Realisasi dan Alokasi Anggaran (%)		Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	JUMLAH ANGGARAN	25.095.877.792	22.438.838.000	22.502.756.206	20.417.192.587	89,67	90,99	-10,59	-9,27
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.899.745.792	9.449.072.000	6.752.355.067	8.841.725.509	97,86	93,57	36,95	30,94
	Belanja Pegawai	6.899.745.792	9.449.072.000	6.752.355.067	8.841.725.509	97,86	93,57	36,90	30,94
	BELANJA LANGSUNG	18.196.132.000	12.989.766.000	15.750.401.139	11.575.467.078	86,56	89,11	-14,43	-12,79
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	955.700.000	3.153.701.000	803.398.902	2.804.455.051	84,06	88.93	229,99	249,07
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	480.647.000	729.178.000	353.176.052	551.192.337	73,48	75.59	51,71	56,07
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.000.000	289.850.000	2.500.000	151.021.400	25,00	52,10	2798,50	5940,86
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	420.170.000	250.570.000	332.490.700	241.056.400	79,13	96,20	-40,36	-27,50
5	Program pengembangan data dan informasi	1.856.000.000	100.000.000	1.795.371.070	95.581.950	96,73	95,58	-94,61	-94,68
6	Program kerjasama pembangunan	1.327.000.000	0	1.040.055.001	0	78,38	0	-100,00	-100,00
7	Program perencanaan pengembangan kota- kota menengah dan besar	3.444.033.000	2.809.817.000	2.319.167.800	2.602.967.890	67,34	92,64	-18,41	12,24
8	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan	551.500.000	0	362.624.316	0	65,75	0	-100,00	-100,00
9	Program perencanaan pembangunan daerah	3.260.900.000	2.678.000.000	3.115.178.800	2.456.151.900	95,53	91,72	-17,88	-21,16
10	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.722.545.000	619.600.000	1.662.171.750	611.788.100	96,50	98,74	-64,03	-63,19
11	Program Penelitian dan Pengembangan	0	696.350.000	0	654.105.050	0	93,93	100,00	100,00
12	Program perencanaan pembangunan pemerintahan dan social budaya	3.029.697.000	1.662.700.000	2.889.270.450	1.407.147.000	95,36	84,63	-45,12	-51,30
13	Program perencanaan pembangunan tata ruang	1.137.940.000	0	1.074.996.298	0	94,47	0	-100,00	-100,00

Sumber : LKJIP Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 dan 2017

Dari tabel di atas terlihat beberapa data pertumbuhan anggaran maupun realisasi yang cukup ekstrim. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penyesuaian serta penataan program dan kegiatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappeda Kota Semarang.

Disamping realisasi kinerja pelayanan sebagaimana ditetapkan pada dokumen Renstra, realisasi kinerja pelayanan Bappeda dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.11
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Semarang
Tahun 2011 - 2017

No	Uraian	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2	Tersedianya dokumen RKPd yang telah ditetapkan dengan Perkada tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Dalam pelaksanaan fungsi Bappeda Kota Semarang di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Dalam kurun waktu tahun 2011-2017 telah tersedia dokumen pembangunan jangka panjang, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana dalam kurun waktu tahun 2011-2015 menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, sedangkan pada perubahan tahun 2016 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, dan selanjutnya pada perubahan tahun 2017 menggunakan dokumen Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n. Namun pada tahun 2016 disusun 3 dokumen RKPD dikarenakan dokumen RKPD Tahun 2017 yang telah disusun perlu disesuaikan dengan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, sehingga kemudian disusun dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017. Demikian pula pada tahun 2017 disusun 3 dokumen RKPD dikarenakan dokumen RKPD Tahun 2018 yang telah disusun perlu disesuaikan dengan dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, sehingga kemudian disusun dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018.

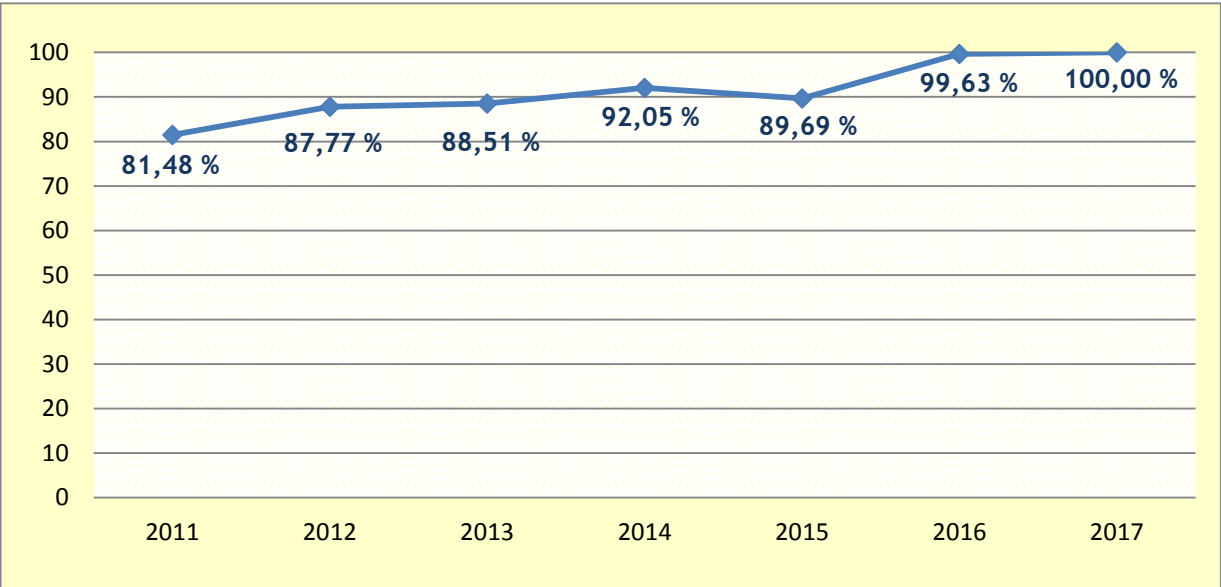
Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.12
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Tahun 2011 - 2017

No	Uraian	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	81,48 %	87,77 %	88,51 %	92,05 %	89,69 %	99,63 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program APBD Tahunan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Selama tahun 2011-2017 telah terdapat kesesuaian program antara RKPD dengan APBD. Sedangkan untuk kesesuaian program antara RPJMD dengan RKPD terus menunjukkan tren yang relatif meningkat, hingga dapat mencapai 100,00 % pada tahun 2017 sebagaimana tersaji pada diagram berikut.



Sumber : Bappeda Kota Semarang

Gambar 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD Kota Semarang
Tahun 2011 - 2017

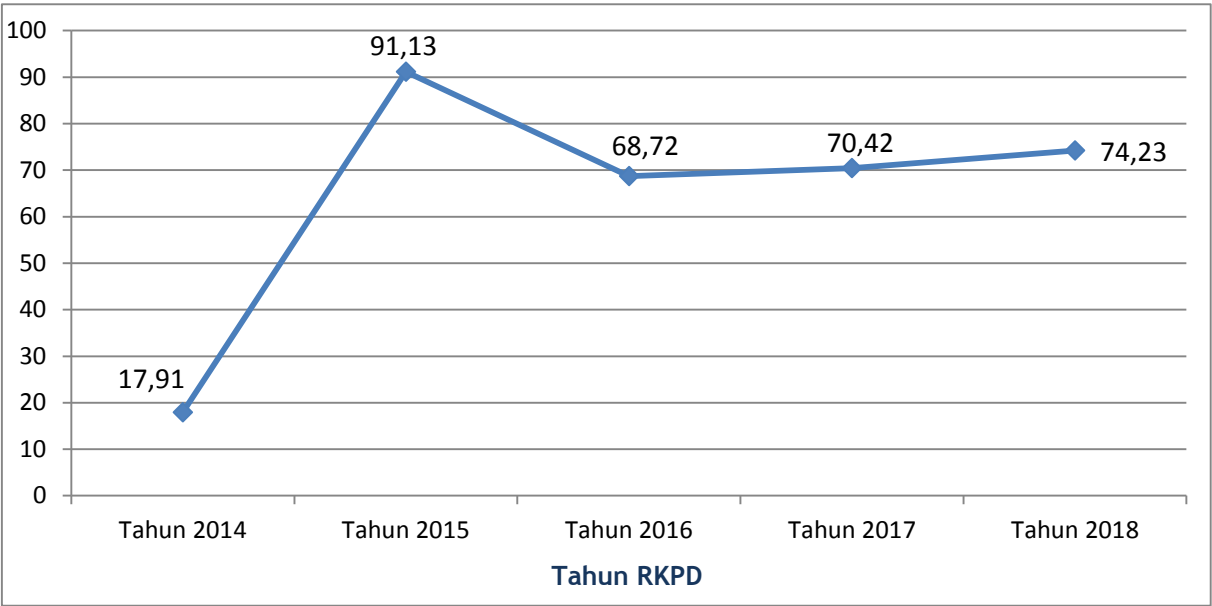
Dari data-data tersebut di atas, dapat terlihat bahwa realisasi kesesuaian program sudah cukup tinggi, bahkan sudah mencapai hasil yang optimal di tahun 2017. Kedepan konsistensi perencanaan ini harus terus dipertahankan sebagai perwujudan dari perencanaan yang ideal.

Selanjutnya kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPd, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.13
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPd Kota Semarang Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Tahun RKPd				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Usulan	7.616 usulan	3.448 usulan	5.985 usulan	4.895 usulan	4.567 usulan
2	Usulan yang Terakomodir	1.364 usulan	3.142 usulan	4.113 usulan	3.447 usulan	3.390 usulan
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	17,91 %	91,13 %	68,72 %	70,42 %	74,23 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang



Sumber : Bappeda Kota Semarang

Gambar 2.6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPd Kota Semarang Tahun 2014 - 2018

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPd bersifat fluktuatif. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir sempat meningkat tajam pada RKPd tahun 2015 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2014), namun kemudian menurun pada RKPd Tahun 2016 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2015), dan kembali mengalami peningkatan pada RKPd Tahun 2017 dan RKPd Tahun 2018 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2016 dan tahun 2017). Selanjutnya persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPd ini perlu terus diupayakan peningkatannya.

Dalam mengakomodir usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan Musrenbang, dimana hal ini terkait dengan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender. Diantaranya adalah keterlibatan berbagai organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender, serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang. Dalam pelaksanaan Musrenbang pada tahun 2017 (penyusunan RKPD Tahun 2018), persentase jumlah peserta perempuan adalah sebesar 22,97 %, dan persentase jumlah peserta laki-laki sebesar 77,03 %. Adapun dalam pelaksanaan Musrenbang pada tahun 2018 (penyusunan RKPD Tahun 2019), persentase jumlah peserta perempuan mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 25,50 %, dan persentase jumlah peserta laki-laki sebesar 74,50 %.

Disamping realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang dalam bidang perencanaan sebagaimana telah dijelaskan di atas, perlu juga diperhatikan realisasi kinerja pelayanan Bappeda di bidang penelitian dan pengembangan, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.14
Jumlah Penelitian yang Dilaksanakan Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Kota Semarang Tahun 2011 - 2017

No	Uraian	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penelitian yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang Bappeda	9 penelitian	5 penelitian	4 penelitian	5 penelitian	4 penelitian	5 penelitian	5 penelitian

Sumber : Bappeda Kota Semarang

Dalam kurun waktu tahun 2011-2017 jumlah penelitian dan pengembangan yang dilakukan belum sebanding dengan meningkatnya perkembangan Kota Semarang sebagai kota metropolitan yang sangat kompleks permasalahannya. Sehingga kedepan perlu dilakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan tersebut, dimana nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Semarang hingga ke akar permasalahannya.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Bappeda yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 - 2017

No	Indikator Kinerja Makro Daerah	Satuan	Tahun						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,11	0,96	0,83	0,81	0,65	0,47	0,29
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,58	5,97	6,25	6,31	5,80	5,69	5,64
3	Laju Inflasi	%	2,87	4,85	8,19	8,53	2,56	2,32	3,64
4	Indeks Gini	poin	0,3545	0,3518	0,3514	0,3807	0,3300	0,33	0,33*
5	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%					30,63	30,87	31,80
6	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	25,49	26,70	27,15	27,24	28,05	27,46	27,55
	Fokus Kesejahteraan Sosial								
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	77,58	78,04	78,68	79,24	80,23	81,19	82,01
	a. Pengeluaran per Kapita disesuaikan	PPP - Ribu Rp	12.271	12.488	12.714	12.802	13.589	13.909	14.334
	b.Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,17	77,18	77,18	77,18	77,20	77,21	77,21
	c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,80	9,92	10,06	10,19	10,20	10,49	10,50
	d.Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,26	13,37	13,66	13,97	14,33	14,70	15,20
8	Angka Kemiskinan	%	5,68	5,13	5,25	5,04	4,97	4,85	4,62
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,65	6,01	6,02	7,76	5,77	5,48	6,61
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,24	67,84	67,10	68,43	66,96	67,80	69,87
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka Indeks					75,64	78,00	83,25
12	Opini BPK	Opini / Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
13	Penduduk yang Berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,95	99,91	99,96	99,97	99,96	99,92	99,96
	ASPEK DAYA SAING								
	Kemampuan Ekonomi Daerah								
1	PDRB per Kapita Berlaku	Ribu Rp					78.892,91253	85.828,00591	91.737,61
2	Nilai Ekspor	US\$	893.742.490	1.010.830.658	1.026.710.670	1.168.710.182	1.155.342.967	1.218.036.901	1.826.171.393
	Sumber Daya Manusia								
5	Rasio Ketergantungan Penduduk	%	39,29	39,65	39,72	39,77	39,80	39,77	38,33

Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dengan Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, dalam kurun waktu tahun 2011-2017 sebagian besar indikator menunjukkan realisasi yang fluktuatif. Untuk indikator Laju Pertumbuhan Penduduk, Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB, Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB, serta Indeks Gini menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Namun untuk indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi menunjukkan kondisi yang kurang baik pada tahun 2017.

Masih pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dengan Fokus Kesejahteraan Sosial, indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kepuasan Masyarakat terus menunjukkan peningkatan. Untuk indikator Angka Kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja serta Opini BPK, meskipun memiliki realisasi yang fluktuatif tapi menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Namun untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka serta Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf menunjukkan kondisi yang kurang baik pada tahun 2017.

Adapun pada Aspek Daya Saing dengan Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, baik indikator PDRB per Kapita Berlaku maupun Nilai Ekspor terus menunjukkan peningkatan. Begitu pula pada Fokus Sumber Daya Manusia, yaitu indikator Rasio Ketergantungan Penduduk menunjukan kondisi yang membaik di tahun 2017.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, dimana urusan perencanaan sudah tidak lagi menjadi urusan wajib maupun pilihan. Sehingga Bappeda Kota Semarang berubah menjadi Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Meskipun demikian, Bappeda memiliki peran yang sangat penting, karena salah satu dari fungsi Bappeda adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota. Perumusan rencana strategis dimaksud dilakukan melalui perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tepat untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.

Tantangan yang akan dihadapi oleh Bappeda Kota Semarang dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diantaranya :

- a. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- b. Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

- c. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaian serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- d. Perencanaan dan penganggaran dengan “*e-performance based budgeting*”.

Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut “*e-performance based budgeting*” sehingga sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun peluang yang tersedia dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

- b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

- c. Tersedianya potensi sumber daya aparatur.

Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

- d. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

B A B I I I
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAPPEDA KOTA SEMARANG

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, disebutkan bahwa permasalahan utama Kota Semarang adalah “Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Kota Semarang”, yang selanjutnya dijabarkan dalam 4 pokok permasalahan, dimana Bappeda terkait dengan pokok permasalahan kedua, yaitu “Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) masih belum optimal”.

Dari pokok permasalahan tersebut dirumuskan sebanyak 3 permasalahan, dimana Bappeda terkait dengan permasalahan kedua yaitu “Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah” yang memiliki 8 akar masalah, yang mana akar permasalahan yang berkaitan dengan Bappeda sebagai institusi perencana adalah “Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan”.

Selanjutnya berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2011-2016), analisis permasalahan Kota Semarang, serta inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Bappeda, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kota Semarang sebagai berikut :

a. Belum Optimalnya Perencanaan Pembangunan Daerah

Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah dijelaskan sebagai berikut :

1) Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan daerah

Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan daerah terdiri dari :

- a) Kesesuaian antar dokumen perencanaan; dalam hal ini terlihat dari persentase kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD, dimana sejak tahun 2011-2013 tidak pernah mencapai 90 %, kemudian meningkat menjadi 92,05 % di tahun 2014, namun turun menjadi 89,69 % di tahun 2015, dan kembali meningkat menjadi 99,63 % di tahun 2016 serta 100,00 % di tahun 2017. Meskipun menunjukkan tren yang meningkat dan telah mencapai hasil yang optimal di tahun 2017, kesesuaian antar dokumen perencanaan ini harus senantiasa dikoordinasikan untuk mempertahankan capaian optimal sebagai perwujudan dari perencanaan yang ideal.

b) Kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan; yaitu antara RKPD dengan APBD, dalam hal ini yang menjadi tanggung jawab Bappeda adalah sampai dengan tataran program, karena pada tataran kegiatan terdapat banyak faktor eksternal di luar kewenangan Bappeda. Untuk kesesuaian program antara RKPD dengan APBD tahun 2011-2017 telah menunjukkan hasil yang optimal yaitu mencapai 100,00 %. Meskipun demikian, kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan ini juga harus senantiasa dikoordinasikan untuk mempertahankan capaian optimal tersebut sebagai perwujudan dari perencanaan yang ideal.

2) Belum optimalnya pengakomodiran usulan Musrenbang

Data yang tersedia menunjukkan belum optimalnya pengakomodiran usulan Musrenbang dalam RKPD, yaitu sebesar 17,91 % pada RKPD Tahun 2014; 91,13 % pada RKPD Tahun 2015; 68,72 % pada RKPD Tahun 2016; 70,42 % pada RKPD Tahun 2017; serta 74,23 % pada RKPD Tahun 2018. Untuk selanjutnya perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender. Data menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang mengikuti pelaksanaan Musrenbang masih terbatas, yaitu pada Musrenbang Tahun 2017 (penyusunan RKPD Tahun 2018) sebesar 22,97 % dan pada Musrenbang Tahun 2018 (penyusunan RKPD Tahun 2019) sebesar 25,50 %, yang mana hal ini dapat menyebabkan perencanaan pembangunan yang kurang sensitif terhadap isu kesetaraan gender.

Dalam mengoptimalkan tingkat kesesuaian perencanaan serta pengakomodiran usulan Musrenbang diperlukan koordinasi intensif dan proses pengendalian dalam penyusunan perencanaan, serta dukungan data evaluasi terhadap hasil perencanaan tersebut.

Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu **belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.**

b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Dalam kurun waktu tahun 2011-2017 jumlah penelitian dan pengembangan yang dilakukan Bappeda Kota Semarang belum sebanding dengan meningkatnya perkembangan Kota Semarang, yaitu rata-rata 5 kajian penelitian per tahun. Dari

jumlah tersebut juga belum dilakukan inventarisasi mengenai pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Oleh karena itu kedepan perlu dilakukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas, serta yang terpenting adalah upaya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan tersebut, dimana nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Semarang.

Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu **masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan.**

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Telaahan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kota Semarang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang tersebut.

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang kemudian dilakukan perubahan pada tahun 2017. RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025, dimana tema pembangunan periode ketiga ini menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Semarang Tahun 2016-2021. Visi pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah sebagai berikut:

“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memerhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin

meningkat, nilai investasi yang semakin besar, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun. Hal-hal tersebut didukung oleh adanya tata kelola birokrasi yang baik yang dilihat melalui peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

SEJAHTERA, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan Kota Semarang yang Hebat ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1
Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021

Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Misi 3 Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Dalam mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, ditetapkan sejumlah 6 tujuan pembangunan daerah dengan 9 indikator kinerja tujuan. Dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 14 sasaran pembangunan daerah dengan 28 indikator sasaran. Selanjutnya juga telah ditetapkan 21 strategi dan 36 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Terkait visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, salah satu fungsi Bappeda adalah “Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota”. Maka dalam perumusan kebijakan perencanaan strategis pembangunan daerah diarahkan pada perwujudan visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, secara umum Bappeda memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian keempat misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda mendukung pencapaian **Misi Kedua**, yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik”**.

Dalam mewujudkan Misi 2 tersebut, terdapat 2 tujuan pembangunan, yaitu (a) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani (Tujuan 3 RPJMD) dan (b) Terwujudnya Kondusifitas Wilayah (Tujuan 4 RPJMD); dimana Bappeda mendukung pencapaian Tujuan 3 RPJMD, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani”**, dengan indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”**.

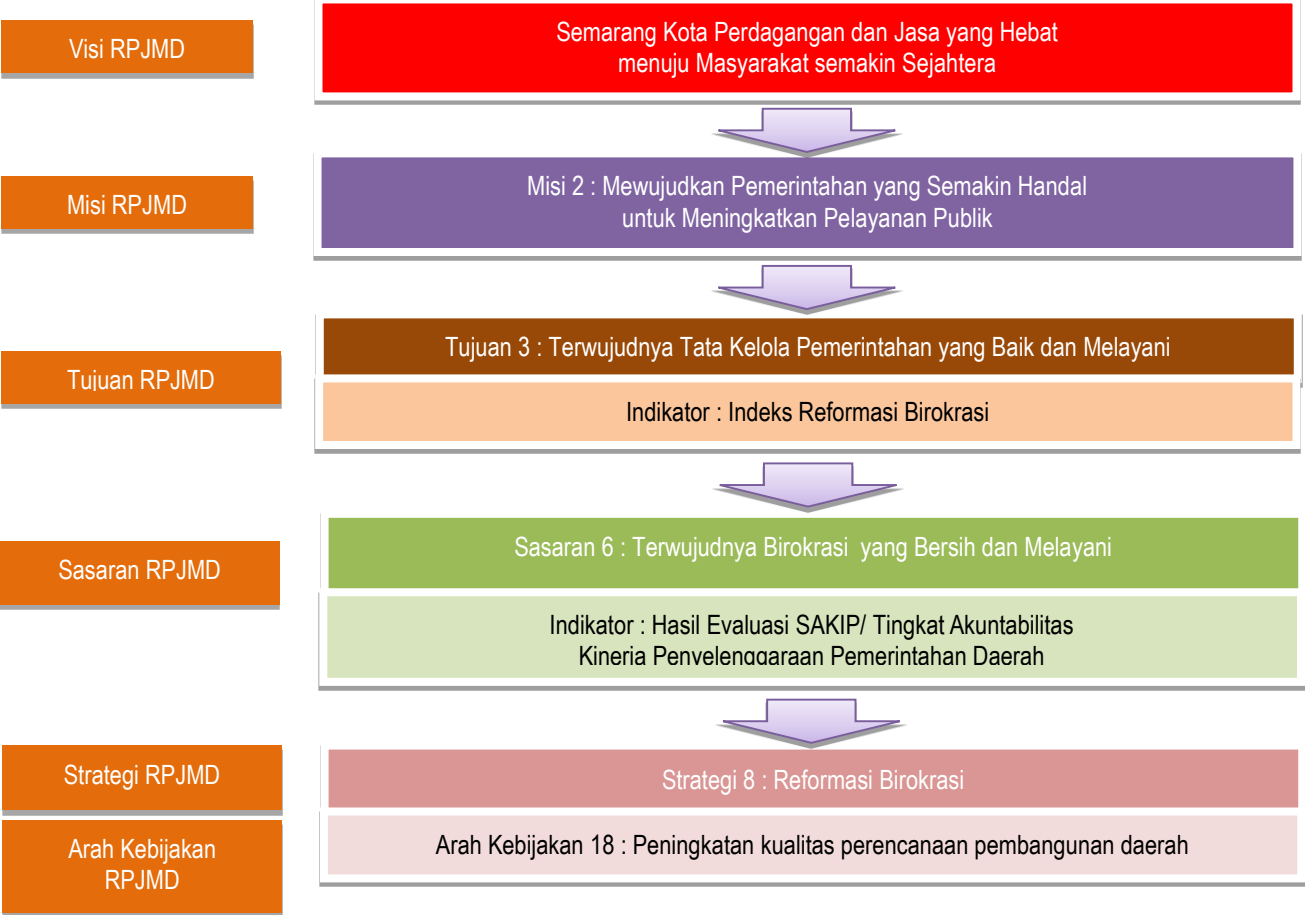
Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut hanya terdapat 1 sasaran pembangunan (Sasaran 6 RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani”**. Pada sasaran ini terdapat 4 indikator sasaran yaitu (a) Indeks Kepuasan

Masyarakat, (b) Opini BPK, (c) Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta (d) Nilai dan Status Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD); dimana Bappeda mendukung pencapaian indikator sasaran “**Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**”.

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat 2 strategi, yaitu (a) Reformasi Birokrasi (Strategi 8 RPJMD) dan (b) Peningkatan Kualitas dan Manajemen Pelayanan Publik (Strategi 9 RPJMD); dimana Bappeda mendukung pencapaian Strategi 8 RPJMD, yaitu “**Reformasi Birokrasi**”.

Dalam menjalankan strategi tersebut terdapat 4 arah kebijakan, yaitu (a) Peningkatan Peran dan Kinerja Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah (Arah Kebijakan 16 RPJMD), (b) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Arah Kebijakan 17 RPJMD), (c) Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Arah Kebijakan 18 RPJMD), serta (d) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Arah Kebijakan 19 RPJMD). Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Bappeda memiliki peran dalam mendukung Arah Kebijakan 18 RPJMD, yaitu “**Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**”.

Secara lengkap kontribusi Bappeda dalam mendukung pencapaian visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang tersaji pada gambar berikut.



Gambar 3.2
Kontribusi Bappeda dalam Mendukung Pencapaian
Visi - Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

a. Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Tahun 2015-2019

Visi Kementerian PPN / Bappenas 2015-2019 yaitu “Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN / Bappenas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
- 2) Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga / Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
- 3) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN / Bappenas.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Kementerian PPN / Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis dan Kredibel

Pada tujuan ini terdapat 1 sasaran yaitu “Terlaksananya Rencana Pembangunan Nasional”, dengan indikator sasaran:

- a) Persentase keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah
- b) Rancangan Perpres RKP
- c) Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L

2) Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Kementerian PPN / Bappenas

Pada tujuan ini terdapat 1 sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian PPN / Bappenas”, dengan indikator sasaran “tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN / Bappenas.

b. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Adapun visi Bappeda Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, Bappeda

secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan / kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Profesional; pelaksanaan kinerja Bappeda sebagai lembaga perencana yang profesional bermakna kondisi kerja yang didukung oleh SDM dengan kapasitas dan kompetensi yang berkualitas dalam mendukung capaian pembangunan daerah serta berkontribusi dalam pembangunan nasional, sehingga kinerja yang dilakukan dapat terukur dan dipertanggungjawabkan.

Partisipatif; mendasarkan pada paradigma dan ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menerapkan asas dan pendekatan partisipatif, yaitu pelibatan peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Inovatif; dalam rangka menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan yang baru, dilakukan melalui upaya pendayagunaan pemikiran dan kemampuan imajinasi yang orisinal serta di luar bingkai konservatif (*out of the box*).

Guna mewujudkan visi Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 di atas, maka dirumuskan 5 misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu :

1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM

Sebagai institusi perencana pembangunan, maka kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat inter-sektoral, multidisiplin dan komprehensif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi.

2) Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka proporsi beban kerja Bappeda lebih besar dari institusi lainnya. Sistem dan tata kerja Bappeda lebih mengarah pada kinerja fungsional, yang menuntut pola dan tata kerja.

3) Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi

Proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila didasarkan pada data dan informasi yang valid dan terkini serta berbasis sistem teknologi informasi.

- 4) **Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan**
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih tinggi.
- 5) **Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif**
Dalam pelaksanaan proses pembangunan diperlukan koordinasi oleh semua unsur terkait termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengetahui kesesuaian antara proses pembangunan dan perencanaan. Disamping itu dilaksanakan evaluasi sebagai dasar perencanaan pembangunan pada tahap selanjutnya. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui pengembangan teknik manajemen perencanaan yang baru.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda selama Tahun 2013 - 2018, dijabarkan sebagai berikut :

- 1) **Misi 1 : Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM**
Tujuan : Menciptakan SDM yang semakin berkualitas.
Sasaran : Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi.
- 2) **Misi 2 : Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien**
Tujuan : Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik.
Sasaran :
 - a) Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran.
- 3) **Misi 3 : Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi**
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
Sasaran :
 - a) Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
 - b) Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (*realtime*) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

- 4) **Misi 4 : Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan**

Tujuan : Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Sasaran :

- a) Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota.
- b) Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

- 5) **Misi 5 : Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.**

Tujuan : Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran :

- a) Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
- b) Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Semarang adalah “Mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional yang mempertimbangkan keserasian fungsi pelayanan regional dan lokal”.

Sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 berikut perubahannya, perlu memperhatikan hasil telaan terhadap RTRW Kota Semarang. Dan sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kota Semarang, Bappeda memiliki kewajiban untuk mengawal perencanaan pada RTRW agar dapat terwadahi dalam RPJMD berikut perubahannya sebagai berikut :

a. Perwujudan Struktur Ruang

- 1) Jalan arteri primer, meliputi :
 - a) Peningkatan Jalan Raya Semarang Kendal - Jalan Siliwangi - Jalan Yos Sudarso - Jalan Usman Janatin - Pertigaan Jalan Kaligawe

- b) Peningkatan Jalan Raya Kaligawe (Pertigaan Jalan bebas hambatan seksi C) - Batas Kota Semarang-Demak
 - c) Pengembangan Jalan Inspeksi Sungai Babon - Jalan Brigjend. Sudiarto - Jalan Sendangmulyo - Pudakpayung - Perempatan Jalan Raya Mijen - Jalan Koptu Suyono
 - d) Pengembangan Ruas Jalan dari Mangkang - Jalan Lingkar Utara Semarang - Pertigaan Jalan Usman Janatin
- 2) Jalan arteri sekunder, meliputi pengembangan jalan lingkar tengah (middle ring road).
- 3) Jalan kolektor primer, meliputi pengembangan dan peningkatan jalan dari perempatan Jalan Lingkar Luar - Mijen - Boja, pengembangan dan peningkatan jalan dari Pertigaan Gunungpati - Jalan Lingkar Luar, pengembangan dan peningkatan jalan dari Pertigaan Jalan Raya Gunungpati - Sekaran - Jalan Lingkar Luar.
- 4) Rencana Persimpangan meliputi peningkatan seluruh persimpangan sebidang jalan di wilayah Kota dan pengembangan persimpangan sebidang rencana jalan outer ring road dan middle ring road.
- 5) Persimpangan tidak sebidang, meliputi :
 - a) Peningkatan simpang susun Jalan Tol Semarang - Solo
 - b) Pengembangan simpang susun Jalan Tol Semarang - Demak
 - c) Pengembangan simpang susun Jalan Tol Semarang - Batang
 - d) Peningkatan dan pengembangan simpang susun dengan rel kereta api di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Pedurungan
- 6) Rencana Pengembangan Pelayanan Angkutan Jalan
- 7) Sistem Transportasi Kereta api Monorail meliputi pengembangan jaringan kereta api monorail yang menghubungkan wilayah sub pusat pelayanan BWK X - pusat pelayanan kota - sub pusat pelayanan BWK V - sub pusat pelayanan BWK IV.
- 8) Rencana Sistem Penyediaan Air Minum
- 9) Rencana Sistem Prasarana Drainase, meliputi Sistem drainase Mangkang; Sistem drainase Semarang Barat; Sistem drainase Semarang Tengah; Sistem drainase Semarang Timur .
- 10) Rencana sistem angkutan umum, meliputi peningkatan pelayanan BRT yang sudah ada dan pengembangan jalur baru
- b. Perwujudan Pola Ruang**
 - 1) Kawasan perdagangan dan jasa
 - 2) Peningkatan kualitas pasar skala pelayanan kota dan atau BWK
 - 3) Peningkatan kawasan perkantoran pemerintah skala kelurahan dan kecamatan di seluruh daerah

- 4) Pengembangan dan peningkatan wisata bahari / pantai
- 5) Peningkatan kualitas kawasan transportasi
- 6) Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelayanan umum

Di samping melakukan telaah terhadap RTRW Kota Semarang, juga perlu dilakukan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 berikut perubahannya, Pemerintah Kota Semarang wajib melaksanakan KLHS RPJMD sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kebijakan pembangunan daerah, yang dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila kebijakan, rencana dan program dilaksanakan. Dan sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kota Semarang, Bappeda memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan KLHS agar dapat terwadahi dalam RPJMD berikut perubahannya. Dengan adanya pengendalian lingkungan dalam bentuk implementasi KLHS, diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisir sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil proses KLHS Penyusunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan KLHS RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib untuk membuat KLHS sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. KLHS RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Meskipun demikian, pedoman tidak dapat menjawab semua kebutuhan sesuai dengan tahapan terutama saat melakukan kajian pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup Kota Semarang. Atas dasar pemahaman tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor SE 04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang kemudian menjadi acuan pelaksanaan KLHS RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Tidak tersedianya data dan informasi yang memadai untuk digunakan dalam proses pengkajian merupakan kelemahan utama dari proses pelaksanaan KLHS Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- c. Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 8 isu strategis, yaitu: (1) Kesenjangan Sosial; (2) Rendahnya Kualitas Pembangunan Kesehatan; (3) Belum Optimalnya Produksi, Distribusi dan Kualitas Hasil Pertanian; (4) Terbatasnya

- Infrastruktur Pembangunan Wilayah; (5) Rendahnya Daya Saing Daerah; (6) Bencana Alam; (7) Kerusakan Lingkungan, dan (8) Belum Tertatanya Penataan Ruang;
- d. Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Semarang sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan, namun ada beberapa catatan penekanan yang perlu menjadi perhatian Tim penyusun RPJMD yaitu menjadikan kota metropolitan berwawasan lingkungan. Meskipun misi sudah memperhatikan pembangunan berkelanjutan tetapi aspek lingkungan yang dapat berimplikasi pada tidak terjaminnya keadilan antarkelompok dan antargenerasi harus mendapatkan perhatian;
 - e. Dari hasil kajian pengaruh didapatkan 12 program prioritas dan mitigasinya terhadap isu strategis, terutama program-program yang terkait dengan pembangunan fisik antara lain yaitu (1) Program pengembangan sentra Industri, (2) Program Penyediaan dan pengelolaan air baku, (3) Program Pembangunan dan Peningkatan sarana dasar perkotaan, (4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman, (5) Program pembinaan PKL dan asongan, (6) Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, (7) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, (8) Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, (9) Program pembangunan jalan dan jembatan, (10) Program pengelolaan keragaman Budaya, (11) Program Pengendalian Banjir dan rob, (12) Program Pelayanan Angkutan;
 - f. Untuk meminimalkan pengaruh / dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun pada Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, terdapat 9 isu strategis. Dari kesembilan isu strategis tersebut, yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda adalah isu strategis keenam, yaitu **“Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi”**, dimana prioritas utama Kota Semarang dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kota Semarang dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan **peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik** melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data.

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Bappeda, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda, telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan terhadap RTRW dan KLHS, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Semarang, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Bappeda Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Rumusan isu strategis pada Perubahan Renstra dan juga Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang;

Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota. Karena itu Bappeda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota.

Dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ini perlu memperhatikan banyak aspek, salah satunya adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi bagi perencanaan pembangunan, serta data capaian target kinerja sebagai *baseline* dalam menentukan target pembangunan selanjutnya. Juga diperlukan perencanaan dan penganggaran yang menganut *“e-performance based budgeting”* agar sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu juga diperlukan peningkatan integrasi program dan kegiatan lintas perangkat daerah, baik dalam pengembangan wilayah, pemerintahan, sosial, budaya, maupun ekonomi daerah.

b. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan). Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah ini terdiri dari kesesuaian antar dokumen perencanaan, dan juga kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan

c. Pengakomodiran usulan Musrenbang

Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

d. Pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan

Perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan hasil kajian penelitian dan pengembangan, diantaranya dengan melakukan publikasi dan sosialisasi, agar hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan serta penyusunan dokumen perencanaan, sehingga nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Semarang.

e. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang.

Pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 sebelum perubahan, telah ditetapkan tujuan utama Bappeda Kota Semarang, yaitu mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan, yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi dan perkantoran.

Seiring diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang serta adanya perkembangan situasi dan kondisi, kemudian mendasari dilakukannya perubahan terhadap RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Hal ini kemudian berimplikasi pada perubahan tujuan dan sasaran pembangunan serta sebagian komponen pendukungnya, sehingga perlu diikuti dengan melakukan perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang. Berkaitan hal tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan perumusan kembali tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan sebagai tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang pada Perubahan Renstra serta Perubahan Kedua Renstra untuk periode Tahun 2016-2021.

Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 - 2021, agar dapat

memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kota Semarang mendukung arah kebijakan Kota Semarang dalam hal **“peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah”**.

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Bappeda Kota Semarang, isu strategis yang menjadi prioritas adalah **“pengkoordinasian pencapaian visi dan misi Walikota yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang”**. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, dimana Bappeda memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsi Bappeda adalah **melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota**. Perumusan rencana strategis tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Semarang.

Dari hasil telaah terhadap Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Bappeda Kota Semarang, didapatkan pokok-pokok perwujudan tujuan Bappeda Kota Semarang, yaitu :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota;
3. Pengkoordinasian pencapaian visi dan misi Walikota yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang.

Dari ketiga pokok perwujudan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, agar dapat terwujud perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, yaitu dalam merumuskan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Dan juga diperlukan suatu upaya untuk mengkoordinasikan pencapaian visi dan misi Walikota tersebut, yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang.

Selanjutnya, untuk tataran tujuan Bappeda Kota Semarang dilakukan pembatasan hanya pada pencapaian tujuan pembangunan Kota Semarang, karena pencapaian sasaran pembangunan Kota Semarang akan dijabarkan pada sasaran Bappeda Kota Semarang.

Dengan demikian dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, yaitu :

**“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas
dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang”**

Indikator dari tercapai atau tidaknya tujuan tersebut dapat terlihat dari ketercapaian tujuan pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Dimana untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang telah ditetapkan 6 tujuan pembangunan, dengan 9 indikator tujuan. Berkaitan hal tersebut maka ditetapkan **indikator tujuan** dari Bappeda Kota Semarang, yaitu **“persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang”**.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Bappeda Kota Semarang tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, dimana Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa perencanaan serta penelitian dan pengembangan memiliki keterkaitan karena dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, dimana penelitian dan pengembangan memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Berhubungan dengan fungsi Bappeda sebagai institusi perencana, juga perlu menelaah aturan-aturan terkait perencanaan yang dapat digunakan dalam perumusan sasaran, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 4, dimana Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan Bappeda Kota Semarang, yaitu dengan mempertimbangan tugas fungsi Bappeda serta aturan-aturan terkait perencanaan, maka ditetapkan sasaran dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan”**. Adapun indikator capaian dari sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang**
 Indikator ini merupakan turunan dari indikator tujuan Bappeda (persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang), dimana tujuan pembangunan Kota Semarang diharapkan dapat tercapai dengan tercapainya sasaran pembangunan Kota Semarang.
- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu**
 Indikator ini merupakan representasi dari berkualitasnya perencanaan pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan bahwa perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan).
- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah**
 Indikator ini menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas akan terwujud dengan dukungan dari hasil penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2016-2021 sebagai berikut.

Tabel 4.1
**MATRIKS TUJUAN, SASARAN, BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
 BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARN	SATUAN	REALISASI	TARGET					TARGET AKHIR
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang	Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	96,99	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,00
SASARAN : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	- Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	89,90	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,00
	- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	%	99,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	76,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra dan juga Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Perubahan Renstra dan Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 - 2021, yaitu **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan”**. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Pengoptimalan Koordinasi Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu **Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang Didukung Pengendalian dan Evaluasi serta Penyediaan Data Informasi Kebutuhan Perencanaan**.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Pengembangan Data dan Informasi.

2. Pengoptimalan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pencapaian Target Kinerja Pembangunan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. **Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya**

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya.

- b. **Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang Perekonomian**

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

- c. **Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar, serta Program Perencanaan dan Koordinasi Penataan Ruang.

3. Pengoptimalan Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu **Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Aplikatif bagi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya, serta Fisik Prasarana dan Lingkungan.**

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan serta Program Kerjasama Pembangunan.

4. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bappeda.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bappeda;**

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- b. **Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappeda;**

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Saranana Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, serta Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Pembangunan Daerah.

- c. **Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Bappeda.**

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi informasi dalam berbagai aspek secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga upaya pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021

Visi : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat menuju Masyarakat Semakin Sejahtera			
Misi : Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	1. Pengoptimalan koordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang didukung pengendalian dan evaluasi serta penyediaan data informasi kebutuhan perencanaan
		2. Pengoptimalan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pencapaian target kinerja pembangunan	a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup bidang pemerintahan, sosial dan budaya
			b. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup bidang perekonomian
			c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pengoptimalan pencapaian target kinerja pembangunan dalam lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
		5. Pengoptimalan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang aplikatif bagi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya, serta fisik prasarana dan lingkungan
		6. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bappeda	a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bappeda
			b. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappeda
			b. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Bappeda

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bappeda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan *outcome* program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan *output* kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. *Outcome* program dan *output* kegiatan saling berkaitan, dimana *outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu, yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 sebelum perubahan, telah disusun serangkaian rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Selanjutnya dengan ditetapkannya Perubahan RPJMD Kota Semarang yang diikuti Perubahan Renstra Bappeda dan kemudian Perubahan Kedua Renstra Bappeda, maka perlu dilakukan penyesuaian serta penataan program dan kegiatan dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang.

Penyesuaian serta penataan program dan kegiatan pada Perubahan Renstra dan Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdapat program dengan indikator outcome yang tidak terukur, tidak berorientasi hasil serta kurang tajam dan terarah.
2. Terdapat program yang terdiri dari kegiatan dengan indikator output yang kurang relevan dalam mendukung pencapaian outcome program.
3. Terdapat program dengan nomenklatur program yang kurang dapat menggambarkan kinerja bidang pelaksana.

4. Terdapat program yang dilaksanakan lebih dari satu bidang, namun tidak terlihat indikator kinerja yang jelas dari setiap bidang pelaksana.
5. Terdapat program yang tumpang tindih fungsinya dengan program lain.
6. Terdapat program yang perlu disinergikan dengan program lain dengan sasaran program yang sama.

Selain hal-hal tersebut di atas juga diambil kebijakan sehubungan penyesuaian serta penataan program dan kegiatan, yaitu efisiensi jumlah kegiatan dengan mensinergikan beberapa kegiatan yang saling terkait menjadi satu kegiatan. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappeda Kota Semarang. Efisiensi jumlah kegiatan terutama dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif, kecuali kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan pendamping dana dari luar APBD Kota Semarang, dimana setiap tahun Bappeda Kota Semarang mendapat dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kota Semarang.

Adapun hasil penataan program dan kegiatan pada Perubahan Renstra dan Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 tersaji pada tabel berikut.

TABEL 6.1
PENATAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENSTRA
DAN PERUBAHAN KEDUA RENSTRA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

PROGRAM	TAHUN						KETERANGAN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7 keg	2 keg	1 keg	2 keg	2 keg	2 keg	Mulai tahun 2017 dilakukan efisiensi kegiatan, dan beberapa kegiatan dialihkan pada program lain yang lebih sesuai
Program Pengembangan Data dan Informasi	6 keg	1 keg					Mulai tahun 2017 dilakukan efisiensi kegiatan, dan pengalihan kegiatan pada program lain yang lebih sesuai.
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	7 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	Efisiensi kegiatan
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	5 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	Efisiensi kegiatan
Program Perencanaan dan Koordinasi Penataan Ruang	2 keg						Pada tahun 2017, program ini disinergikan dengan Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar
Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar	7 keg	5 keg					Mulai tahun 2018, kegiatan pada program ini dialihkan dalam Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang lebih dapat menggambarkan kinerja bidang pelaksana
Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Mulai dilaksanakan pada tahun 2018
Program Kerjasama Pembangunan	2 keg						Mulai tahun 2017, kegiatan pada program ini disinergikan dalam Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar serta Program Penelitian dan Pengembangan
Program Penelitian dan Pengembangan		3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	Mulai dilaksanakan tahun 2017, dan pada tahun 2018 dilakukan penataan kegiatan sesuai kewenangan pelaksana kegiatan

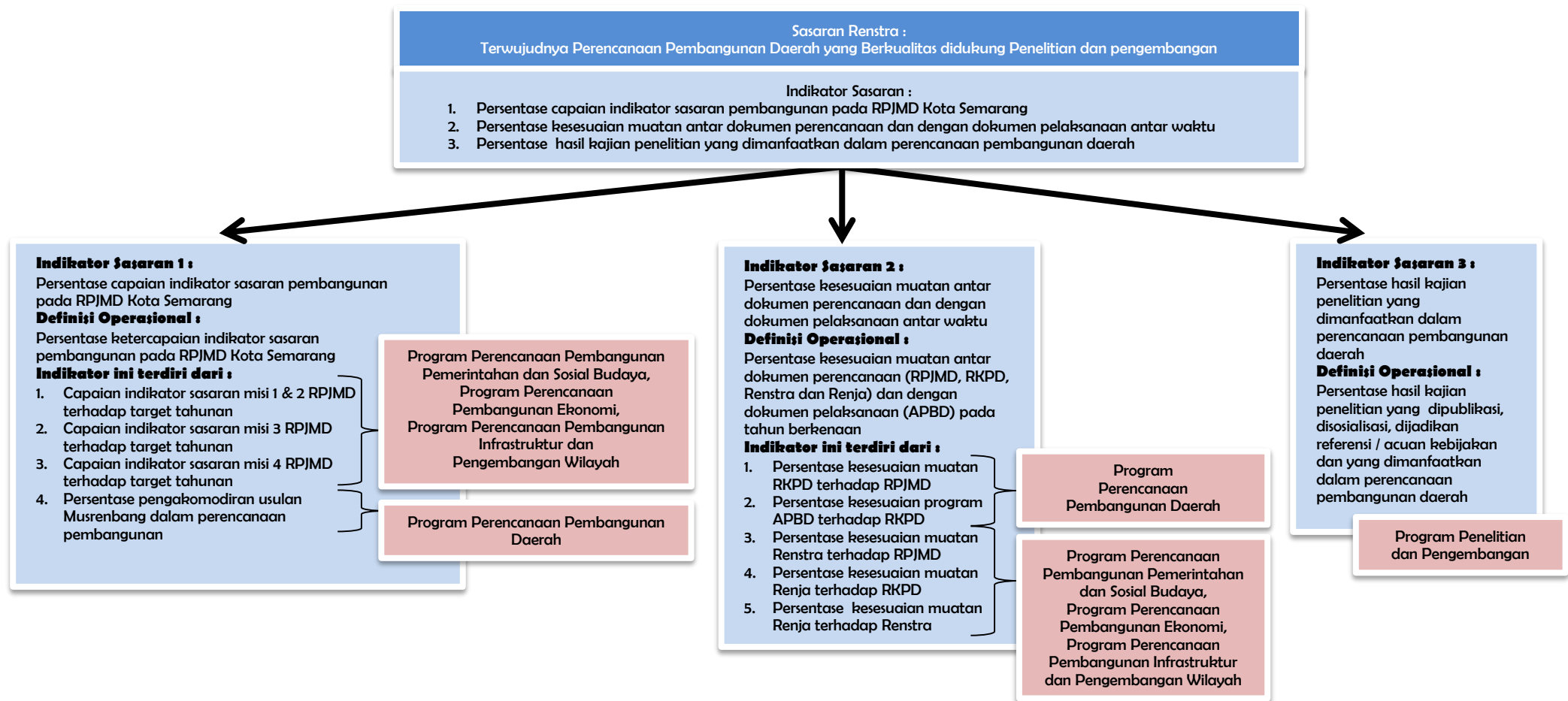
PROGRAM	TAHUN						KETERANGAN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11 keg	12 keg	14 keg	13 keg	12 keg	12 keg	Penataan kegiatan sesuai output kegiatan
Program Peningkatan Saranana Prasarana Aparatur	3 keg	3 keg	3 keg	6 keg	6 keg	6 keg	Penataan kegiatan sesuai output kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Efisiensi kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Pembangunan Daerah	2 keg						Mulai tahun 2017, program ini disinergikan dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10 keg	10 keg	8 keg	8 keg	8 keg	9 keg	Jumlah kegiatan sesuai kebutuhan

Selanjutnya dalam penentuan indikator *outcome* program dan juga indikator *output* kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Bappeda Kota Semarang, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Terkait penentuan indikator *outcome* program, pada bab-bab sebelumnya telah ditetapkan sasaran pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, yaitu **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan”**, yang memiliki 3 indikator sasaran yaitu : (1) Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang; (2) Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu; (3) Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan program-program utama yang menjadi *core business* Bappeda Kota Semarang (sesuai penataan mulai tahun 2018) yaitu :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
5. Program Penelitian dan Pengembangan

Adapun kerangka alur pikir dalam penentuan indikator *outcome* dari masing-masing program utama dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran tersaji pada gambar sebagai berikut.



GAMBAR 6.1
KERANGKA ALUR PIKIR PENENTUAN INDIKATOR OUTCOME PROGRAM UTAMA
PADA PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

Selain program-program utama tersebut, juga terdapat program-program yang bersifat menunjang pelaksanaan program-program utama. Program-program penunjang beserta indikator *outcome* programnya yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator *outcome* program “cakupan pelayanan administrasi perkantoran”.
2. Program Peningkatan Saranana Prasarana Aparatur, dengan indikator *outcome* program “cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur”.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan indikator *outcome* program “cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur”.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikator *outcome* program “tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan”.

Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator *output* kegiatan yang mendukung pencapaian indikator *outcome* program. Penyusunan rencana kegiatan juga memperhatikan *Roadmap* Pengembangan *Smart City* pada Bappeda Kota Semarang.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program dan *output* kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.

TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

TUJUAN / SASARAN	KODE PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUPUT) (SATUAN)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						2017		2018		2019		2020		2021		K	RP
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang			Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang (%)	96,99		97,00		97,50		98,00		98,50		99,00		99,00	
Sasaran : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan			- Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang (%)	89,90		90,00		90,50		91,00		91,50		92,00		92,00	
			- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu (%)	99,82		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah (%)	76,00		80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00	
	3.1.01.01.15	Program Pengembangan Data dan Informasi	- Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, dari sisi jumlah, jenis dan akurasi (%)	95,00	1.795.371.070	95,00	140.000.000		0		0		0		0	95,00	1.935.371.070
	1.06.01.15.005	Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Semarang	- Buku 8 Kelompok Data Profil Daerah (Numerik) Kota Semarang - Buku 8 Kelompok Data Tingkat Kecamatan Semester I & II - Buku Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan) - Buku Profil Daerah (Dokumen) - Peta Tematik Kota Semarang (Dokumen) - Basis data SIPD pada website Ditjen Bangsa Kemendagri	2 2 2 1 1 2	189.832.800												189.832.800
	1.06.01.15.006	Dokumentasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian	- Jurnal Riptek (Edisi) - Lomba Krenova Kota Semarang (Kegiatan) - Stand Pemkot dalam PPI Jawa Tengah (Stand)	2 1 1	333.473.970												333.473.970
	1.06.01.15.014	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	- Laporan Evaluasi RKPD (Triwulan) - Penyusunan Aplikasi Monev Perencanaan (Paket) - Koordinasi data kinerja Renja SKPD dan RKPD Kota Semarang (Triwulan)	4 1 4	323.100.300												323.100.300
	1.06.01.15.018	Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring Dan E-Office Berbasis Web	- Operasional dan maintenance program E-Office, Updating program E-Office & Web (Bulan)	12	203.045.200												203.045.200
	1.06.01.15.019	Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang	- Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Triwulan) - Pemantauan Lapangan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tugas - Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Tugas Pembantuan di Kota	4 1 10	84.155.200												84.155.200
	1.06.01.15.023	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	- Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Thn 2015 (Dokumen) - Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang Tahun 2015 - Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Semarang - Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2014/2015 - Buku Indeks Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola - Buku Statistik Industri Besar & Sedang Kota Semarang Tahun 2015 - Buku Saku Kota Semarang Tahun 2015 (Dokumen) - Buku Statistik Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang - Buku Statistik Kecamatan Kota Semarang Tahun 2015(Dokumen)	1 1 1 1 1 1 1 16	661.763.600												661.763.600
			- Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2015 - Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2015 - Buku Statistik Kota Semarang Tahun 2015 (Dokumen) - Buku Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah Kota - Pengembangan sistem database dan informasi perencanaan	1 1 1 1 1													
	3.1.01.01.15.025	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Semarang	- Buku 8 Kelompok Data Profil Daerah (Numerik) Kota Semarang - Buku 8 Kelompok Data Tingkat Kecamatan Semester I & II - Buku Profil Daerah (Dokumen) - Peta Tematik Kota Semarang (Dokumen) - Buku Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	 2 1 1 1	140.000.000											2 2 1 1 1	140.000.000

TUJUAN / SASARAN	KODE PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUPUT) (SATUAN)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3.1.01.01.17	Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar	- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah) (%) - Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan (%) - Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar yang disusun (Dokumen)		2.319.167.800	100,00	2.764.290.000									100,00	5.083.457.800
						90,00										90,00	
				8,00		14,00										14,00	
	3.1.01.01.17.036	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	- Kebijakan Perencanaan Ruang Daerah (%) - Fasilitas Kegiatan Kota Lama Semarang (%) - Fasilitas Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (%) - Dokumen Kajian Perencanaan Berbasis Spasial (Dokumen)			100	482.000.000									100	482.000.000
						100										100	
						100										100	
						1										1	
	1.06.01.17.064	Studi Kelayakan Kawasan Kampung Bahari	- Dokumen studi kelayakan (FS) kawasan Kampung Bahari - Dokumen RTPLP (Rencana Tindak Penataan Lingkungan	1 1	590.076.700												590.076.700
	1.06.01.17.065	RIS Transportasi Kota	- Draft peraturan walkota tentang Rencana Induk Sistem Transportasi	1	393.031.000												393.031.000
	1.06.01.17.066	Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (Rp12jm) Kota Semarang	- Dokumen Perencanaan pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kota Semarang (Dokumen)	1	297.147.800												297.147.800
	1.06.01.17.067	Kajian Aspek Sosial Banjir	- Dokumen kajian tentang aspek sosial BKT (Dokumen)	1	297.461.200												297.461.200
	3.1.01.01.17.070	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur	- Kebijakan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kota Semarang (%) - Fasilitas Kegiatan SPAM Semarang Barat (%) - Fasilitas Kegiatan Gerakan 100-0-100 dalam rangka pencapaian Universal Access 2019 (%) - Fasilitas kegiatan Kampung Bahari Tambak Lorok (%) - Fasilitas Kegiatan Pamsimas (%) - Fasilitas Kegiatan Pokja AMPL (%) - Fasilitas Kegiatan NUSP (%) - Fasilitas Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (%) - Fasilitas Kegiatan Penanganan Sampah (%) - Dokumen Kajian & draft perwal tarif air pamsimas (Dokumen) - Dokumen kajian layanan sanitasi dan lumpur tinja terjadwal (Dokumen) - Dokumen Data Lokasi Permukiman Kumuh Squater (Dokumen) - Dokumen Masterplan Wisata Jatibarang dan Desa Wisata Kandri (Dokumen)	100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1	668.834.100	100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1	550.000.000								100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1	1.218.834.100	
	3.1.01.01.17.071	Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	- Fasilitas kegiatan DP2K (%) - Fasilitas kegiatan SIMA Banger (%) - Fasilitas kegiatan DP2K, BPP Banger SIMA dan BPK2L (%)			100 100 100	732.290.000									100 100 100	732.290.000

TUJUAN / SASARAN	KODE PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUPUT) (SATUAN)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
				K	RP	2017		2018		2019		2020		2021		K	RP
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.06.01.17.072	Penyusunan Dokumen Amdal Banjir Kanal Timur	- Dokumen Lingkungan Hidup Banjir Kanal Timur (Dokumen)														0
	1.06.01.17.090	Review Fs Outer RingRoad	- Dokumen review FS Semarang Outer Ring Road (Dokumen)	1	72.617.000												72.617.000
	3.1.01.01.17.092	Penyusunan RP2KP & Evaluasi Penanganan Kumuh	- Evaluasi dan strategi penanganan kawasan kumuh (%)			100	500.000.000									100	500.000.000
	3.1.01.01.17.093	Replikasi PLPBK	- Dokumen RTPLP / Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Dokumen RTPLP Desa Wisata (Kandri, Jatirejo, Pongangan,			100	500.000.000									100	500.000.000
	3.1.01.01.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu (%) - Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan (%) - Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan (%) - Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan (%)	99,82 70,60 99,63 100,00	3.115.178.800 	100,00 71,00 100,00 100,00	2.778.000.000 	100,00 72,00 	1.950.000.000 	100,00 73,00 	1.950.000.000 	100,00 74,00 	2.450.000.000 	100,00 75,00 	2.700.000.000 	100,00 75,00 100,00 100,00	11.828.000.000
	1.06.01.19.008	Penyusunan RKPD	- Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2017 (Dokumen) - Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Th 2017 (Dokumen) - Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Th 2016 (Dokumen)	1 1 1	522.875.000												522.875.000
	3.1.01.01.19.013	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	- Fasilitasi Pendampingan Simperda Tk. Kelurahan dan Kecamatan (Kel & Kec) - Pendampingan Penyusunan Program Kegiatan Renja SKPD (SKPD) - Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD (Dokumen)	193 62 3	637.382.700		1.525.000.000									3	2.162.382.700
	1.06.01.19.016	Penyusunan Naskah Akademis RPJMD	- Dokumen Naskah Akademis Review dan Revisi RPJMD Tahun 2016 - 2021 (Dokumen)	1	129.488.100												129.488.100
	1.06.01.19.017	Penyelenggaraan Musrenbang	- Pemantauan Musrenbang Tingkat Kelurahan Tahun 2016 (Kelurahan) - Penyelenggaraan Musrenbang (Kegiatan) - Persiapan Musrenbang Tk Kecamatan (Kecamatan) - Fasilitator Kecamatan dan Kelurahan (Kelurahan) - Penyusunan Perwal Juklak Juknis (Pedoman) Musrenbang (Dokumen)	100 1 16 177 1	494.568.300												494.568.300
	3.1.01.01.19.020	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	- Laporan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2017 (Triwulan) - Pengembangan Sistem Aplikasi Monev Perencanaan (Paket) - Laporan Evaluasi RPJMD Tahun 2016 - 2021 (Dokumen) - Dokumen Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021 (Dokumen) - Perda Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021 (Perda) - Pelatihan User Aplikasi Monev Perencanaan (Paket) - Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 2017 (Triwulan) - Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2017 (Dokumen)	 1 1 1 1 1 2 1	 1.253.000.000	 4 1 1 1 1 2 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	4 1 1 1 1 2 1	1.253.000.000
	1.06.01.19.025	Penyusunan dan Pembahasan KUA PPAS	- Dokumen KUA PPAS Tahun 2017 (Dokumen) - Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2016 (Dokumen)	1 1	485.277.000												485.277.000
	1.06.01.19.029	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Sida) Kota Semarang	- Diseminasi dengan narasumber dari pusat, provinsi & daerah lain (best practice) (Kegiatan) - Fasilitasi kegiatan koordinasi penguatan SiDa (koordinasi TKK dan Koordinasi Tim Pelaksana SiDa Kota Semarang) (Kegiatan)	1 5	94.844.300												94.844.300
	1.06.01.19.031	Penyusunan Perda Dokumen RPJMD	- Dokumen Perda RPJMD 2016 - 2021 (Dokumen)	1	750.743.400												750.743.400
	3.1.01.01.19.037	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	- Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD (Dokumen) - Dokumen RPJMD / Perubahan RPJMD Kota Semarang (Dokumen) - Dokumen Perubahan RPJPD Kota Semarang (Dokumen) - Dokumen Back Ground Study RPJMD (Dokumen)					2	1.950.000.000	2	1.850.000.000	2	2.350.000.000	2	2.600.000.000	8 1 1 1	8.750.000.000

TUJUAN / SASARAN	KODE PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUPUT) (SATUAN)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
				K	RP	2017		2018		2019		2020		2021		K	RP
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD (Dokumen) - Dokumen NA RPJMD (Dokumen) - Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah (Dokumen) - Laporan evaluasi hasil RKPD Kota Semarang (Dokumen) - Laporan Evaluasi RPJMD Kota Semarang (Dokumen) - Laporan Evaluasi RPJPD Kota Semarang (Dokumen) - Laporan evaluasi keterkaitan Perencanaan, Penganggaran dan Pencapaian Sasaran Pembangunan (Dokumen) - Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang Semester I dan II (Dokumen) - Buku Profil Daerah dan Data Spasial Kota Semarang Semester I dan II (Dokumen) 														
	3.1.01.01.19.038	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang Semester I dan II (Dokumen) - Buku Profil Daerah dan Data Spasial Kota Semarang Semester I dan II (Dokumen) 							2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6	300.000.000
	3.1.01.01.20	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Perekonomian) (%) - Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan (%) - Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian (%) 	100,00	1.662.171.750	100,00	619.600.000	100,00	847.000.000	100,00	850.000.000	100,00	900.000.000	100,00	925.000.000	100,00	5.803.771.750
	3.1.01.01.20.003	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (FEDEP)	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Akhir Kegiatan Fedep (Dokumen) - Profil Investasi Kota Semarang (Dokumen) - Fasilitasi kelembagaan FEDEP (Bulan) - Monev klaster (Tahap) - Forum rembug klaster (Kali) - Pameran klaster (Kali) - Pelatihan bagi klaster (Kali) 	12 2 20 3 2	369.699.100	1 12 2 20 4 2	310.000.000	1 1 1	325.000.000	1 1 1	325.000.000	1 1 1	330.000.000	1 1 1	325.000.000	5 4 12 2 20 4 2	1.984.699.100
	3.1.01.01.20.004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dunia Usaha (Dokumen) - Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Produksi (Dokumen) - Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Makro (Dokumen) - Rapat Koordinasi dan sinkronisasi Pembangunan Ekonomi (Bulan) - Rakor dan Workshop Perencanaan bidang Ekonomi (Kegiatan) 			1 1 1 12 15	309.600.000	1 1 1	522.000.000	1 1 1	525.000.000	1 1 1	570.000.000	1 1 1	600.000.000	5 5 5 12 15	2.526.600.000

TUJUAN / SASARAN	KODE PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUPUT) (SATUAN)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
				K	RP	2017		2018		2019		2020		2021		K	RP
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.06.01.20.028	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha	- Koordinasi (Kegiatan) - Kajian Potensi Daerah (Paket) - FGD (Kegiatan) - Sosialisasi (Kegiatan)	15 1 1 1	318.515.350												318.515.350
	1.06.01.20.031	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produksi	- Rapat koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Produksi (Bulan) - Rapat Koordinasi dan Workshop Ekonomi Produksi (Kegiatan)	12 8	383.193.800												383.193.800
	1.06.01.20.033	Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekowisata	- Dokumen Masterplan Pengembangan Ekowisata (Dokumen)	1	345.798.300												345.798.300
	1.06.01.20.034	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri	- Dokumen Rencana Pengembangan Industri Kota (RPIK) Semarang (Dokumen)	1	244.965.200												244.965.200
	1.06.01.24	Program Perencanaan dan Koordinasi Penataan Ruang	- Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Tata Ruang (%)	100,00	1.074.996.298											100,00	1.074.996.298
	1.06.01.24.001	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup	- Kebijakan perencanaan ruang daerah Fasilitasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (%) - Fasilitasi kegiatan kota lama (Kali)	100 48	591.645.398												591.645.398
	1.06.01.24.002	Evaluasi RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031	- Dokumen peninjauan kembali RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Dokumen)	1	483.350.900												483.350.900
	3.01.25	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Pembangunan Daerah	- Jumlah aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan kompetensinya (melalui pendidikan kedinasan, diklat, bintek, dll) (%)	40,00	362.624.316												362.624.316
	1.06.01.25.001	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana	- Peningkatan kualitas SDM perencana melalui pelatihan, sosialisasi, FGD, dan workshop (Jenis Kegiatan)	4	290.545.316												290.545.316
	1.06.01.25.002	Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Perencanaan	- Pendampingan pembahasan LKPJ 2015, APBD Perubahan 2016 dan APBD Murni 2017 (Kegiatan)	3	72.079.000												72.079.000
	3.1.01.01.26	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Infrastruktur dan Pengembangan Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan) (%)					100,00 90,50	2.275.500.000	100,00 91,00	2.300.000.000	100,00 91,50	2.400.000.000	100,00 92,00	2.600.000.000	100,00 92,00	9.575.500.000
	3.1.01.01.26.001	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	- Laporan hasil koordinasi Transportasi & Sumber Daya Air (Dokumen) - Laporan hasil koordinasi Tata Ruang Pertanahan dan LH (Dokumen) - Laporan Hasil koordinasi Perencanaan Sarpras Perumahan dan Permukiman (Dokumen) - Pengembangan Sistem Informasi Spasial dalam Perencanaan Pembangunan (Aplikasi) - Masterplan Technopark					1 1 1 1	2.275.500.000	1 1 1 1	2.300.000.000	1 1 1 1	2.400.000.000	1 1 1 1	2.600.000.000	4 4 4 2 1	9.575.500.000
	3.1.01.01.27	Program Penelitian dan Pengembangan	- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah (%) - Cakupan pengkoordinasian / fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi (%)	100,00		80,00 100,00	715.340.000	85,00	1.377.500.000	90,00	1.475.000.000	95,00	1.575.000.000	100,00	1.675.000.000	100,00 100,00	6.817.840.000
	3.1.01.01.27.001	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga	- Dokumen kajian Penelitian (Dokumen)			5	286.500.000									5	286.500.000
	3.1.01.01.27.003	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kota Semarang	- Fasilitasi kegiatan koordinasi penguatan SIDA Kota Semarang (Koordinasi TTK dan Koordinasi Tim Pelaksana SIDA Kota Semarang) - Dokumen tata laksana penguatan SIDA Kota Semarang (Dokumen) - Diseminasi dengan narasumber dari pusat, provinsi dan daerah lain (best practice) (Laporan) - Sekretariat tim penguatan SIDA (Sekretariat)			100 1 1 1	71.970.000									100 1 1 1	71.970.000

TUJUAN / SASARAN	KODE PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUPUT) (SATUAN)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						2017		2018		2019		2020		2021			
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3.1.01.01.27.004	Dokumentasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian	- Lomba Krenova (Pemenang) - Stand Pemkot dalam PPI Jateng (Stand) - Jurnal Riptek (Edisi/Tahun) - Sosialisasi hasil litbang dari berbagai lembaga kelittbangan terkait pembangunan Kota Semarang (Tahap)			9 1 2 2	356.870.000									9 1 2 2	356.870.000
	3.1.01.01.27.005	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	- Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi (Dokumen) - Laporan Monev Penguatan SIDA (Dokumen) - Dokumen pendukung SIDA : Kajian pengembangan technopark (2018), Kajian untuk Pengembangan SIDA (2019), Rencana Aksi Pengembangan SIDA (2020), Raperwal Pengembangan SIDA (2021) (Dokumen) - Dokumen Sinkronisasi Roadmap SIDA dengan Review RPJMD (Dokumen)					3 1 1 1	400.000.000	3 1 1	450.000.000	3 1 1	500.000.000	3 1 1	550.000.000	12 4 4 1	1.900.000.000
	3.1.01.01.27.006	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya	- Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya (Dokumen) - Laporan Penyelenggaraan lomba krenova dan pameran produk inovasi (Dokumen)					3 2	400.000.000	3 2	425.000.000	3 2	450.000.000	3 2	475.000.000	12 8	1.750.000.000
	3.1.01.01.27.007	Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan	- Penelitian dan Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan (Dokumen) - Laporan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (prosiding) (Dokumen) - Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal Riptek) (Edisi) - Kajian / Studi Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan (Dokumen) - Dokumen / Review KLHS RPJMD Kota Semarang (Dokumen)					3 1 2 2	577.500.000	3 1 2 2	600.000.000	3 1 2 2 1	625.000.000	3 1 2 2 1	650.000.000	12 4 8 8 2	2.452.500.000
	3.1.01.01.28	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Pemerintahan, Sosial dan Budaya) (%) - Capaian indikator sasaran misi 1 & 2 RPJMD terhadap target tahunan (%) - Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya (%)		2.889.270.450 100,00	100,00 90,00	1.936.500.000	100,00 90,50	1.877.500.000	100,00 91,00	1.780.000.000	100,00 91,50	2.180.000.000	100,00 92,00	2.185.000.000	100,00 92,00 100,00	9.959.000.000
	3.1.01.01.28.001	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	- Kajian tentang Penurunan AKI (Dokumen) - Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Dokumen) - Koordinasi Kegiatan Komda Lansia (%) - Koordinasi Kegiatan Kota Sehat (%) - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemsosbud (%) - Dokumen Grand Desain Kecamatan (Dokumen) - Dokumen rencana umum TMMD Tahun 2018 (Dokumen) - Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan dan Hasil Verifikasi Aksi PPK Tahun 2017 (laporan) - Evaluasi MDG's Kota Semarang (Dokumen) - RAD Kota Sehat (Dokumen) - RAD Lansia (Dokumen) - Review SPKD (Dokumen) - Pengembangan Web Gakin (Buah)		644.518.100 100	1 1 100 100 100 15 1 4 1 1 1 1	1.106.500.000									1 1 100 100 100 15 1 4	1.751.018.100

[illegible]

TUJUAN / SASARAN	KODE PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUPUT) (SATUAN)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
				K	RP	2017		2018		2019		2020		2021		K	RP
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	803.398.902	100,00	2.221.326.000	100,00	2.534.267.000	100,00	1.622.596.000	100,00	2.614.712.000	100,00	2.808.755.000	100,00	12.605.054.902
	3.1.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda (Bulan) - Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan (Bulan) - Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan (%)			12	118.000.000		1.000.000		1.000.000					12	120.000.000
	3.1.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Langganan telepon (Bulan) - Langganan telepon (%) - Langganan koran (Bulan) - Langganan koran (%)	12	20.747.729	12	45.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	12	195.747.729
	3.1.01.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas (Unit)	25	7.236.000	25	20.000.000	29	20.000.000	29	20.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	143	127.236.000
	3.1.01.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kerja (Bulan) - Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kerja (%)	12	12.403.000	12	25.000.000	100	25.000.000							12	62.403.000
	3.1.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos (Bulan) - Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos (%)	12	59.991.080	12	65.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	12	374.991.080
	3.1.01.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Pemenuhan cetakan dan penggandaan (Bulan) - Pemenuhan cetakan dan penggandaan (%)	12	32.450.700	12	46.000.000	100	40.267.000	100	43.596.000	100	50.712.000	100	54.755.000	60	267.780.700
	3.1.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Bulan) - Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (%)	12	318.000	12	5.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	60	11.318.000
	3.1.01.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Pemenuhan peralatan rumah tangga (Bulan) - Pemenuhan peralatan rumah tangga (%)	12	11.414.500	12	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	60	86.414.500
	3.1.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	- Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Buku) - Langganan surat kabar (Bulan) - Langganan surat kabar (%)	1	89.000	10	1.000.000	20	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	30	9.089.000
	3.1.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai (Bulan) - Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai (%)	12	23.251.000	12	47.500.000	100	49.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	12	254.751.000
	3.1.01.01.01.018	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (Bulan) - Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (%)	12	579.065.392	12	1.665.592.000	100	1.845.000.000	100	1.025.000.000	100	1.870.000.000	100	2.035.000.000	12	9.019.657.392
	3.1.01.01.01.020	Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan	- Pemenuhan kebutuhan jasa kepanitiaan														
	3.1.01.01.01.028	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	- Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (Bulan) - Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (%)					100	311.000.000	100	300.000.000	100	330.000.000	100	340.000.000	100	1.281.000.000
	3.1.01.01.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	- Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan (Bulan) - Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan (%)	12	56.432.501	12	168.234.000	100	110.000.000	100	70.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	12	659.666.501
	3.1.01.01.01.158	Pengelolaan Sistem Informasi	- Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda (Bulan) - Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda (%)					100	30.000.000	100	20.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000		135.000.000
	3.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100,00	353.176.052	100,00	389.000.000	100,00	680.000.000	100,00	355.000.000	100,00	730.000.000	100,00	730.000.000	100,00	3.237.176.052
	3.1.01.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	- Mobil Dinas / Operasional (Unit)							1	150.000.000					1	150.000.000
	3.1.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Pemenuhan Perlengkapan Gedung Kantor (%)							100	25.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	275.000.000
	3.1.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor (%)							100	25.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	325.000.000
	3.1.01.01.02.019	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (%)	100	192.815.400	100	112.000.000	100	325.000.000	0	0	0	0	0	0	100	629.815.400
	3.1.01.01.02.024	Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional (Bulan) - Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional (%)	12	159.918.152	12	275.000.000	100	350.000.000	100	150.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	12	1.634.918.152
	3.1.01.01.02.026	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang perlengkapan gedung kantor (Bulan) - Pemeliharaan dan penggantian suku cadang perlengkapan gedung kantor (%)							100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000		3.000.000

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan penyesuaian dari IKU Bappeda dalam Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebelum perubahan.

Adapun Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 7.1

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARN	SATUAN	REALISASI	TARGET					TARGET AKHIR
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Semarang	Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	96,99	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,00
SASARAN : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	- Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang	%	89,90	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,00
	- Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu	%	99,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	76,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

Selanjutnya dalam Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 tersaji indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada. Adapun Indikator Kinerja Bappeda Kota Semarang yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Bappeda Kota Semarang yang Mengacu pada
Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B	ASPEK PELAYANAN UMUM									
III	PENUNJANG URUSAN									
	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan									
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	Doku men	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu	Doku men	2	2	3	3	2	2	2	16
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD Tahunan	%	89,69	99,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Kesesuaian Program di RKPD Tahunan dengan Program di APBD Tahunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Hasil Kajian Penelitian yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	%	-	-	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

Selain indikator kinerja tersebut di atas, terdapat Indikator Kinerja Daerah yang bersifat makro, dimana Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah perlu memantau pencapaiannya, sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021
Dalam Fungsi Koordinasi Bappeda Kota Semarang

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,65	0,47	0,47	0,44	0,41	0,38	0,35	0,35
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80	5,69	5,81	5,98	6,16	6,33	6,50	6,50
3	Laju Inflasi	%	2,56	2,32	3,3±1	3,1±1	3,0±1	2,8±1	2,7±1	2,7±1
4	Indeks Gini	poin	0,3300	0,3300	0,3424	0,3393	0,3362	0,3332	0,3301	0,3301
5	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	30,63	30,87	31,13	31,2	31,27	31,34	31,41	31,41
6	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,05	27,46	27,38	27,42	27,46	27,50	27,54	27,54
	Fokus Kesejahteraan Sosial									
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai indeks	80,23	81,19	81,61	82,00	82,40	82,80	83,23	83,23
	a. Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp. /thn	13.589,00	13.909,00	14.195,25	14.480,61	14.777,99	15.087,94	15.468,62	15.468,62
	b. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,20	77,21	77,22	77,23	77,23	77,25	77,26	77,26
	c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,20	10,49	10,60	10,70	10,79	10,88	10,96	10,96
	d. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,33	14,70	14,77	14,85	14,92	15,00	15,07	15,07
8	Angka Kemiskinan	%	4,97	4,85	4,82	4,76	4,67	4,60	4,53	4,53
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,77	5,48	5,37	5,17	4,97	4,77	4,57	4,57

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,96	67,80	68,07	68,96	69,63	70,08	70,30	70,30
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka Indeks	75,642	78	79	81	83	85	87	87
12	Opini BPK	Opini / Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Penduduk yang Berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,96	99,92	99,96	99,96	99,97	99,97	99,98	99,98
	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga									
14	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	17,92	20,35	25,56	39,45	49,70	59,90	69,22	69,22
C	ASPEK DAYA SAING									
1	Kemampuan Ekonomi Daerah									
1	PDRB per kapita berlaku	Ribu Rp	78.892,912 53	85.828,005 91	93.105,58	101.087,67	110.028,82	119.477,32	129.805,87	129.805,87
2	Nilai Ekspor	US\$	1.155.342. 967	1.218.036. 901	1.277.890. 977	1.339.164. 982	1.400.434. 987	1.461.712. 992	1.522.987. 000	1.522.987. 000
	Penataan Wilayah									
1	Persentase Wilayah Kota Yang Tangguh, Produktif, Dan Berkelanjutan	%	-	63,69	68,63	75,61	82,17	86,36	91,77	91,77
	Sumber Daya Manusia									
1	Rasio Ketergantungan Penduduk	%	39,80	39,77	39,75	39,72	39,69	39,67	39,64	39,64

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Perubahan Kedua Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Kota Semarang dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2016-2021, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Perubahan Kedua Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Semarang, yaitu sejak Perubahan Kedua Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2018, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, Perubahan Kedua Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang.



LAMPIRAN I

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA ESELON III DAN ESELON IV BAPPEDA KOTA SEMARANG

**INDIKATOR KINERJA ESELON III DAN ESELON IV
BAPPEDA KOTA SEMARANG**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1 SASARAN : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase capaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Semarang - Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu 	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu - Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan 	Kepala Sub Bidang Penyusun Rencana Pembangunan Daerah	1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	- Dokumen Perencanaan (RKPD, P-RKPD, RPJMD, RPJPD, NA, Background Study, Rancangan Teknokratik)
					Kepala Sub Bidang Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah		- Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan (RKPD, RPJMD, RPJPD)
					Kepala Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah		- Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah (pengendalian kesesuaian antar dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah, jangka panjang, dan dengan dokumen penganggaran)
		Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Sosial dan Budaya	2 Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian indikator sasaran misi 1 & 2 RPJMD terhadap target tahunan - Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Pemerintahan, Sosial dan Budaya) 	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan	2 Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Semarang	- Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang, Profil Daerah dan Data Spasial Kota Semarang
					Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial	1 Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	- Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan
							- Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial
							- Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Budaya
					Kepala Sub Bidang Perencanaan Budaya	- Laporan Renum TMMD	
					Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial	2 Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	- LP2KD - Laporan Kinerja TKPKD - Laporan Kegiatan TKPKD - Buku Gerbang Hebat - Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Kampung Tematik
						3 Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)	- Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
					Kepala Sub Bidang Perencanaan Budaya	4 Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	- Laporan Kinerja Pemantauan Peredaran Garam dalam rangka Penanggulangan GAKY

**INDIKATOR KINERJA ESELON III DAN ESELON IV
BAPPEDA KOTA SEMARANG**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian	3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan - Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Perekonomian) 	Kepala Sub Bidang Perencanaan Dunia Usaha Kepala Sub Bidang Ekonomi Produksi Kepala Sub Bidang Ekonomi Makro Kepala Sub Bidang Perencanaan Dunia Usaha	1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 2 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (FEDEP)	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dunia Usaha - Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Produksi - Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Makro - Laporan Akhir Kegiatan Fedep
		Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	4 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan - Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (Rumpun Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah) 	Kepala Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air Kepala Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kepala Sub Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman	1 Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil koordinasi Transportasi & Sumber Daya Air - Laporan hasil koordinasi Tata Ruang Pertanahan dan Lingkungan Hidup - Laporan Hasil koordinasi Perencanaan Sarpras Perumahan dan Permukiman
		- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	5 Program Penelitian dan Pengembangan	- Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	1 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi - Laporan Monev Penguatan SIDA - Dokumen pendukung SIDA : Kajian Pengembangan Technopark serta Sinkronisasi Roadmap SIDA dengan Perubahan RPJMD (2018), Kajian Pengembangan SIDA (2019), Rencana Aksi Pengembangan SIDA (2020), Raperwal Pengembangan SIDA (2021)
					Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Sosial dan Budaya	2 Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya - Laporan Penyelenggaraan lomba krenova dan pameran produk inovasi
					Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan	3 Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dan Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan - Laporan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (prosiding) - Jurnal penelitian dan pengembangan - Kajian / Studi Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan

**INDIKATOR KINERJA ESELON III DAN ESELON IV
BAPPEDA KOTA SEMARANG**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sekretaris	1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Bimbingan Teknis Perencanaan Dan Pelatihan Formal	- Pengiriman peserta bintek sesuai kebutuhan serta pelaksanaan workshop / bintek / FGD / sosialisasi
			2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan
						2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Langganan telepon dan surat kabar
						3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	- Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas
						4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kerja
						5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos
						6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Pemenuhan cetakan dan penggandaan
						7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
						8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Pemenuhan peralatan rumah tangga
						9 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	- Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan serta surat kabar
						10 Penyediaan Makanan dan Minuman	- Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai
						11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
						12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	- Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
						12 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	- Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan
						13 Pengelolaan Sistem Informasi	- Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda

**INDIKATOR KINERJA ESELON III DAN ESELON IV
BAPPEDA KOTA SEMARANG**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	JABATAN ESELON IV	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3 Program Peningkatan Saranana Prasarana Aparatur	- Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	- Mobil Dinas / Operasional
						2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Pemenuhan Perlengkapan Gedung Kantor
						3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Pemenuhan Peralatan Gedung Kantor
						4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional
						5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Pemenuhan biaya service dan penggantian suku cadang Perlengkapan Gedung Kantor
						6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Pemenuhan biaya service dan penggantian suku cadang Peralatan Gedung Kantor
			4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	- Laporan Keuangan Bulanan Bappeda
						2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	- Laporan prognosis realisasi anggaran Bappeda
						3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Laporan keuangan akhir tahun Bappeda
						4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	- Laporan keuangan semesteran Bappeda
					Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	5 Penyusunan RKA SKPD & DPA SKPD	- Dokumen DPA dan DPPA Bappeda
					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi		- Dokumen RKA Bappeda
					Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	6 Penyusunan LKPJ SKPD	- Dokumen LKPJ Bappeda
						7 Penyusunan LAKIP	- Dokumen LAKIP Bappeda
						8 Penyusunan Renja SKPD	- Dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda
						9 Penyusunan Renstra SKPD	- Dokumen Renstra Bappeda
						10 Review & Revisi Renstra PD	- Dokumen Perubahan Renstra Bappeda



LAMPIRAN II

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

C A S C A D I N G BAPPEDA KOTA SEMARANG

Program 8 (Eselon III) : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (MEDIATE OUTCOME)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terdapatnya fasilitas peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam menunjang kinerja perencanaan pembangunan daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100,00	60,00	70,00	75,00	80,00

Kegiatan 1 (Eselon IV) : Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelatihan Formal							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tertfasilitasinya peningkatan kapasitas pegawai	Pelaksanaan workshop / bintek / FGD / sosialisasi	Paket/%	4 / 100	100	100	100	100
	Pengiriman peserta bintek sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	100

Program 9 (Eselon III) : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (MEDIATE OUTCOME)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terdapatnya pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja perencanaan pembangunan daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terperuhnya pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan	Bulan %	12	100	100		

Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terperuhnya pelayanan komunikasi dan informasi	Langganan telepon	Bulan %	12	100	100	100	100
	Langganan koran	Bulan %	12	100			

Kegiatan 3 (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terperuhnya kelancaran operasional kendaraan dinas	Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	Unit	25	29	29	30	30

Kegiatan 4 (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kerja	Bulan %	12	100			

Kegiatan 5 (Eselon IV) : Penyediaan Alat Tulis Kantor							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya alat tulis untuk kelancaran administrasi perkantoran	Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos	Bulan %	12	100	100	100	100

Kegiatan 6 (Eselon IV) : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tertersilainya cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	Bulan %	12	100	100	100	100

Kegiatan 7 (Eselon IV) : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terperuhnya penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bulan %	12	100	100	100	100

Kegiatan 8 (Eselon N) : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terpeliharanya kebersihan kantor	Pemenuhan peralatan rumah tangga	Bulan %	12	100	100	100	100

Kegiatan 9 (Eselon IV) : Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Tertfasilitasinya bahan bacaan dan peraturan bagi pegawai	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Buku	10	20				
	Langganan surat kabar	%			100	100	100	100
Kegiatan 10 (Eselon IV) : Penyediaan Makanan dan Minuman								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Tertfasilitasinya rapat dan kunjungan tamu	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	Bulan %	12	100	100	100	100	100
Kegiatan 11 (Eselon IV) : Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Tertfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan %	12	100	100	100	100	100
Kegiatan 12 (Eselon IV) : Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Tertfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	%		100	100	100	100	100
Kegiatan 13 (Eselon IV) : Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Tertfasilitasinya pemenuhan target tugas perkantoran	Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan	Bulan %	12	100	100	100	100	100
Kegiatan 14 (Eselon IV) : Pengelolaan Sistem Informasi								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Terwujudnya kelancaran Simbarin, e-office dan website Bappeda	Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda	Bulan		100	100	100	100	100

Program 10 (Eselon III) : Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur							
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (MEDIATE OUTCOME)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya pelayanan sarana prasarana aparatur dalam menunjang kinerja perencanaan pembangunan daerah	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100

Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	100			
Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terpenuhinya kelancaran operasional kendaraan dinas / operasional	Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional	Bulan %	12	100	100	100	100
Kegiatan 3 (Eselon IV) : Pemeliharaan Rutin / berkala Mebelur							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya mebelair yang berfungsi dengan baik	Pemeliharaan Mebelur	Bulan %	12	100			
Kegiatan 4 (Eselon IV) : Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya Mobil Dinas / Operasional	Mobil Dinas / Operasional	Unit			1		
Kegiatan 5 (Eselon IV) : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Pemenuhan Perlengkapan Gedung Kantor	%			100	100	100
Kegiatan 6 (Eselon IV) : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Pemenuhan peralatan Gedung Kantor	%			100	100	100
Kegiatan 7 (Eselon IV) : Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021

		TUAN		2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang berfungsi dengan baik		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang Perlengkapan Gedung Kantor	%			100	100	100
Kegiatan 8 (Eselon IV) : Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET					
2017	2018	2019	2020	2021				
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi dengan baik	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang Peralatan Gedung Kantor	%			100	100	100	
Kegiatan 9 (Eselon IV) : Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET					
2017	2018	2019	2020	2021				
Tersedianya Gedung Kantor yang berfungsi dengan baik	Rehabilitasi Gedung Kantor	%				100	100	
Program 11 (Eselon III): Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (MEDIATE OUTCOME)	SATUAN	TARGET					
2017	2018	2019	2020	2021				
Terejadinya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan yang berkualitas	Terb. pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	100	100	
Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET					
2017	2018	2019	2020	2021				
Tersedianya data pertanggungjawaban keuangan bulanan Bappeda	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Bappeda	Bulan %	12	100	100	100	100	
Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET					
2017	2018	2019	2020	2021				
Tersedianya data keuangan akhir tahun Bappeda	Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	Dokumen	1	1	1	1	1	
Kegiatan 3 (Eselon IV) : Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET					
2017	2018	2019	2020	2021				
Tersedianya data keuangan semesteran Bappeda	Laporan keuangan semesteran Bappeda	Dokumen	1	1	1	1	1	
Kegiatan 4 (Eselon IV) : Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran								
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET					
2017	2018	2019	2020	2021				
Tersedianya data prognosis realisasi anggaran Bappeda	Dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran Bappeda	Dokumen	1	1	1	1	1	

Kegiatan 5 (Eselon IV) : Kegiatan Penyusunan LKPJ SKPD							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya data keterangan pertanggungjawaban Bappeda	Dokumen LKPJ Bappeda	Dokume n	1	1	1	1	1
Kegiatan 6 (Eselon IV) : Penyusunan LAKIP							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya data akuntabilitas kinerja Bappeda	Dokumen Lakip Bappeda	Dokume n	1	1	1	1	1
Kegiatan 7 (Eselon IV) : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja bappeda	Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bappeda	Dokume n	1				
Kegiatan 8 (Eselon IV) : Penyusunan Renja SKPD							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya dokumen perencanaan tahunan Bappeda	Dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda	Dokume n	2	2	2	2	2
Kegiatan 9 (Eselon IV) : Penyusunan RKA & DPA SKPD							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya dokumen rencana dan pelaksanaan anggaran (induk dan perubahan) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Bappeda	Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA Bappeda	Dokume n	3	4	4	4	4
Kegiatan 10 (Eselon IV) : Penyusunan Renstra SKPD							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah Bappeda	Dokumen Renstra Bappeda	Dokume n					1
Kegiatan 11 (Eselon IV) : Penyusunan / Revisi Renstra SKPD							
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SA TUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya perubahan dokumen perencanaan jangka menengah Bappeda	Dokumen perubahan renstra Bappeda Tahun 2016-2021	Dokume n	1				